



PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2025-2045**

Tanjung Selor
2024





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum (<i>Instrumental Input</i>)	1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-4
1.4. Maksud dan Tujuan Pekerjaan	1-6
1.5. Sistematika Dokumen RPJPD Kab.Bulungan	1-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1. Geografi	2-1
2.1.2. Demografi	2-7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-9
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi	2-9
2.2.1.1. PDRB	2-9
2.2.1.2. Laju Inflasi	2-16
2.2.1.3. PDRB per Kapita	2-17
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan	2-18
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia	2-19
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	2-21
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	2-21



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



2.2.2.2.	Rata-rata Lama Sekolah.....	2-22
2.2.2.3.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	2-23
2.2.2.4.	Angka Usia Harapan Hidup.....	2-24
2.2.2.5.	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	2-26
2.3.	Aspek Daya Saing.....	2-27
2.3.1.	Daya Saing Infrastruktur	2-30
2.3.2.	Daya Saing Iklim Investasi	2-34
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	2-37
2.3.3.1.	Aksebilitas Daerah	2-37
2.3.3.2.	Infrastruktur Air Bersih.....	2-40
2.3.3.3.	Infrastruktur Energi Listrik	2-41
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	2-37
2.3.4.1.	Angka Kriminalitas.....	2-41
2.3.4.2.	Kemudahan Perijinan	2-43
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	2-43
2.4.1.	Pendidikan	2-43
2.4.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah.....	2-43
2.4.1.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah	2-44
2.4.1.3.	Rasio Guru Terhadap Murid.....	2-45
2.4.1.4.	Rasio Jumlah Murid dan Sekolah	2-46
2.4.2.	Aspek Kesehatan.....	2-46
2.4.2.1.	Angka Kematian Bayi	2-46
2.4.2.2.	Angka Kematian Balita	2-48
2.4.2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2-49
2.4.2.4.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.....	2-51
2.4.2.5.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2-52
2.4.2.6.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	2-52
2.4.2.7.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	2-53
2.4.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-54
2.4.3.1.	Kondisi Jalan	2-54
2.4.3.2.	Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk...	2-54



2.4.3.3. Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.....	2-55
2.5. Evaluasi Hasil Capaian RPJPD Periode Sebelumnya	2-55
2.5.1. Kesimpulan Capaian RPJPD Periode Sebelumnya.....	2-55
2.5.2. Rekomendasi dari Hasil Evaluasi sebagai Masukan Bagi RPJPD Kab.Bulungan 2025-2045.....	2-56
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik.....	2-59
2.5.1. Asumsi Dasar.....	2-59
2.5.2. Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang.....	2-60
2.5.3. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi.....	2-61
2.5.4. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2-62
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	2-64

BAB III PERMASALAHAN UMUM DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	3-1
3.1.1. Permasalahan Perekonomian	3-1
3.1.2. Permasalahan Sosial dan SDM.....	3-1
3.1.3. Permasalahan Lingkungan.....	3-2
3.1.4. Permasalahan Infrastruktur	3-2
3.1.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	3-2
3.2. Isu Strategis.....	3-2
3.2.1. Isu Strategis Global	3-2
3.2.1.1. Isu Terkait Pembangunan Berkelanjutan pada SDG's	3-3
3.2.1.2. Isu Terkait Perkembangan Demografi Global...3-4	
3.2.1.3. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global.....	3-4
3.2.2. Isu Strategis Nasional.....	3-5
3.2.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara.....	3-8
3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....	3-12
3.2.5. Isu Strategis Daerah	3-12



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Bulungan
2025-20454-1
- 4.2. Misi Daerah sebagai Perwujudan Visi dalam RPJPD
Kabupaten Bulungan 2025-20454-4

BAB V SASARAN & ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ...5-1
 - 5.1.1. Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai
Pusat Perekonomian dan Pengembangan wilayah
di Kalimantan yang Unggul5-1
 - 5.1.2. Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang
Berperan Penting dalam Lingkup Regional,
Nasional, dan Internasional serta menjadi
Penopang bagi IKN5-2
 - 5.1.3. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten
Bulungan yang Berdaya Saing.....5-4
 - 5.1.4. Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat di Kabupaten
Bulungan yang religius, berdemokratis dan
berlandaskan hukum5-5
 - 5.1.5. Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan
dan berkeadilan dengan konsep pembangunan
yang berkelanjutan5-6
- 5.2. Tahapan Pelaksanaan RPJPD dan Skala Prioritas5-8
 - 5.2.1. RPJM Pertama (2025-2029)5-9
 - 5.2.2. RPJM Kedua (2030-2034)5-10
 - 5.2.3. RPJM Ketiga (2035-2039).....5-11
 - 5.2.4. RPJM Keempat (2040-2045)5-11
- 5.3. Indikator Capaian Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten
Bulungan 2025-20455-12

BAB VI PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan	2-2
Tabel 2.2	Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan	2-2
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari 2021.....	2-6
Tabel 2.4	Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi, dan Tekanan Udara Dirinci per Bulan di Kabupaten Bulungan.....	2-6
Tabel 2.5	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan	2-7
Tabel 2.6	Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-masing Kecamatan	2-8
Tabel 2.7	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan	2-10
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023	2-11
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023	2-13
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)	2-15
Tabel 2.11	PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021	2-17
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan	2-19
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2023	2-19
Tabel 2.14	Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2022	2-22
Tabel 2.15	Persentase penduduk 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis	2-22
Tabel 2.16	Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara	2-23



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023	2-24
Tabel 2.18 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang dilahirkan terakhir, 2022	2-26
Tabel 2.19 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulungan 2020-2022.....	2-29
Tabel 2.20 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	2-29
Tabel 2.21 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	2-32
Tabel 2.22 Distribusi PDRD atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha DI Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023)	2-33
Tabel 2.23 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PRDR Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023.....	2-33
Tabel 2.24 Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023	2-34
Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023.....	2-36
Tabel 2.26 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (Orang) Tahun 2019-2023	2-36
Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	2-39
Tabel 2.28 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023	2-41
Tabel 2.29 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan Setiap tahunnya	2-41
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Bulungan 2021/2023.....	2-43
Tabel 2.31 Rasio Ketersediaan Sekolah.....	2-44



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



Tabel 2.32 Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kab. Bulungan 2022/2023 dan 2023/2024.....	2-45
Tabel 2.33 Jumlah murid, Jumlah Sekolah dan Rasio Murid dan Sekolah	2-45
Tabel 2.34 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2020/2023.....	2-51
Tabel 2.35 Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023	2-52
Tabel 2.36 Rasio Dokter Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2023.....	2-52
Tabel 2.37 Rasio Tenaga medis Per satuan penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2023	2-53
Tabel 2.38 Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2017-2022.....	2-54
Tabel 2.39 Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2022	2-54
Tabel 2.40 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan	2-60
Tabel 2.41 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulungan 2025-2045.	2-62
Tabel 2.42 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	2-62
Tabel 2.43 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Minum	2-63
Tabel 2.44 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	2-63
Tabel 2.45 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan berdasarkan jumlah Produksinya	2-63
Tabel 2.46 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan	2-63
Tabel 2.47 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan	2-64
Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD dan Target Tahapan RPJMD.....	4-4
Tabel 4.2 Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, dan RPJPD Kab.Bulungan.....	4-8
Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan 2025-2045	5-13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bulungan	2-4
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan kumulatif pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Bulungan	2-16
Gambar 2.3	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023	2-22
Gambar 2.4	Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2019-2023	2-27
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan	2-27
Gambar 2.6	Konsumsi Rumah Tangga 2019-2023	2-30
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023.....	2-37
Gambar 2.8	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023	2-39
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2019-2023	2-39
Gambar 2.10	Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Bulungan 2023	2-47
Gambar 2.11	Angka Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Bulungan Tahun 2023.....	2-48
Gambar 2.12	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2023 ..	2-50
Gambar 2.13	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 2025-2045...	2-61
Gambar 2.14	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan	2-69
Gambar 2.15	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan	2-76
Gambar 2.16	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan	2-78



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana pembangunan daerah, dalam perjalanan waktunya, seringkali menghadapi dinamika yang tidak dapat diprediksi sebelumnya saat proses penyusunan. Kondisi ini kemudian menyebabkan dokumen rencanan pembangunan daerah menjadi tidak relevan lagi untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan terkini. Permendagri Nomo 86 tahun 2017 sebagai acuan normatif dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah telah mengamanatkan bahwa perubahan-perubahan yang ada dan isu strategis terkini tetap perlu diselesaikan secara berkesinambungan dalam rencana pembangunan daerah, terutama dalam hal ini adalah keberlangsungan rencana dalam periode jangka panjang. Sebagai langkah dalam menentukan tahapan selanjutnya dalam perencanaan pembangunan daerah tentunya perlu melihat capaian dari rencana pembangunan sebelumnya, hal-hal yang belum tercapai namun masih menjadi isu penting tentunya perlu terus dilanjutkan dalam tahapan rencana selanjutnya, dan isu-isu penting terkini terkait pembangunan daerah perlu diakomodir dalam tahapan selanjutnya. Tentunya konsep perencanaan yang berkesinambungan ini dilakukan dalam konteks merumuskan rencana pembangunan yang responsif adalah dengan rencana pembangunan yang dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan dan perubahan yang terjadi di daerah dengan mengakomodir isu strategis dan permasalahan terkini yang ada.

Berdasarkan capaian keberhasilan, tantangan, dan peluang serta penguatan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulungan sejak tahun 1998 hingga tahun 2024 dengan mempedomani RPJPD 2005-2025 dan yang terakhir RPJMD 2021-2026, bertujuan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

mengapai Kabupaten Bulungan yang religius, sejahtera, dan unggul, aman, dinamis, serta berkelanjutan, maka perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2019-2024.

Perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2025 – 2045 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, di mana tujuan dari pedoman penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD tahun 2025 – 2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional serta mampu memberikan ruang yang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum (*Instrumental Input*)

Dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan ini sebagai instrumental input yang perlu diperhatikan/diacu. Secara umum dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- g. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; sudah diubah dengan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-0055ndang);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

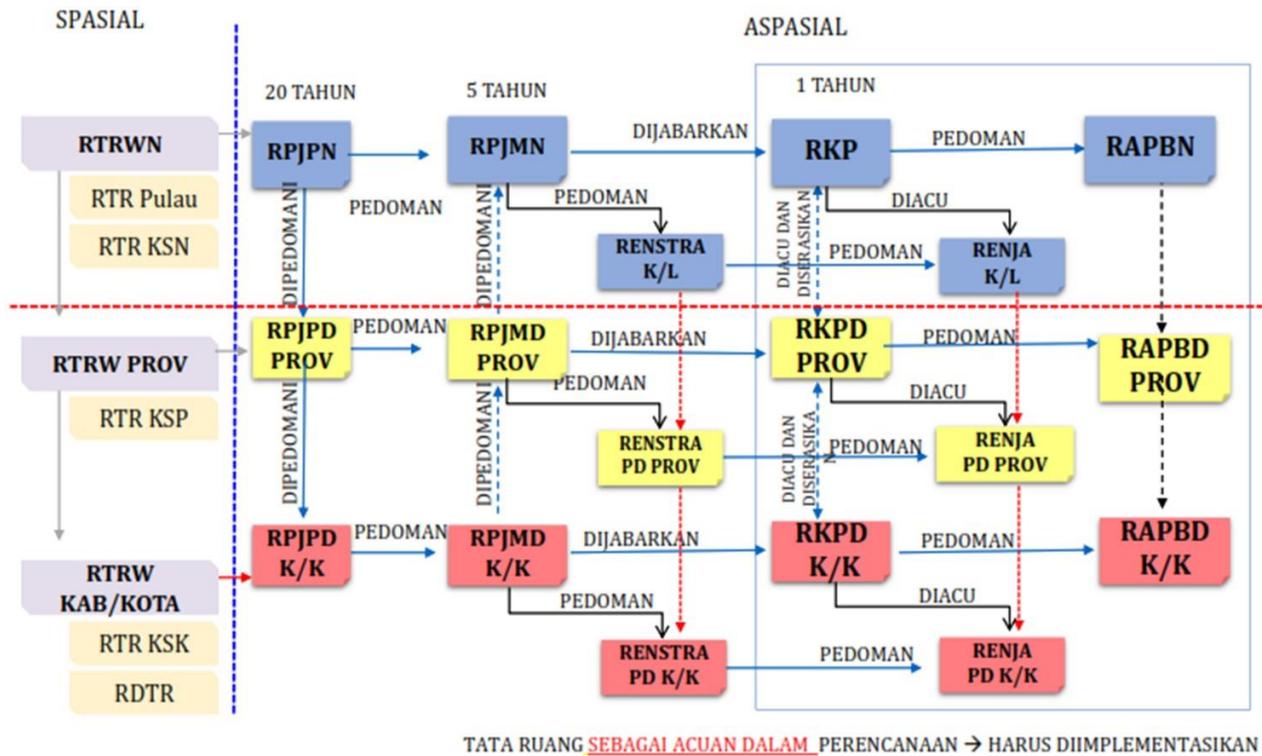


- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan berkolaborasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045, perlu dilakukan penyesuaian dengan dokumen-dokumen tingkat Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.



1.3.1. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bulungan dengan RPJPN

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN tertuang visi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Kabupaten Bulungan. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.



1.3.2. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bulungan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara

RPJPD Kabupaten Bulungan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam RPJPD provinsi.

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bulungan dengan RTRW Kabupaten Bulungan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bulungan perlu mempedomani RTRW Kabupaten Bulungan. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bulungan dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencana pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bulungan dengan KLHS Kabupaten Bulungan

Dokumen KLHS menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai tahapan awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai perwujudan visi dan misi Pembangunan Daerah yang telah diselaraskan dengan kondisi aktual isu strategis pembangunan daerah serta penyelarasan dengan dokumen rencana terkini untuk kemudian menjadi arahan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang pada periode jangka panjang berikutnya



Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen RPJPD yang diwujudkan kedalam beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang Perencanaan pembangunan daerah
- (2) Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- (3) Penyelarasan RPJPD dengan kebijakan dan isu strategis aktual
- (4) Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang berdasarkan hasil evaluasi;
- (5) Peningkatan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dari dokumen rencana sebelumnya
- (6) Menyediakan dokumen dan pedoman Perencanaan pembangunan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan berdasarkan pada kondisi riil, potensi daerah dan proyeksi kedepan
- (7) Sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pembangun kepentingan (stakeholder) pembangunan dalam Menyusun RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan melaksanakan Musrenbang Daerah

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD Kab. Bulungan

Muatan dokumen yang dijabarkan dalam sistematika penyajian dokumen RPJPD Kabupaten Bulungan ini antara lain terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Yang memuat secara ringkas isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta maksud dan tujuan.

BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulungan seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.



BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang yang dirumuskan pada setiap periode pembangunan jangka menengah.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah selama 20 tahun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah dikaji dan dirumuskan sebelumnya.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang, arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Sasaran pokok RPJPD 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI Penutup

Menjelaskan ketentuan Perencanaan menjelang akhir periode Perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 (empat) periode kedepan



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kabupaten Bulungan secara astronomis, terletak antara 20 09' 19" – 30 34' 48" Lintang Utara dan 1160 04' 41" – 1170 57' 56" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulungan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Luas Wilayah Kabupaten Bulungan sekitar 13.181,92 km² yang terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Peso dengan luas wilayah mencapai 3.142,79 km² atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan. Diurutan kedua ada Kecamatan Sekatak dengan luas wilayah mencapai 1.993,98 km² atau 15,13%, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah mencapai 1.722,74 km² dan Kecamatan Peso Hilir dengan luas wilayah 1.639,71 km². Sementara itu Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu dengan luas wilayah sebesar 198,32 km² atau 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan, Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Utara. Selain wilayah daratan yang berada di Pulau Kalimantan, Kabupaten Bulungan juga memiliki wilayah daratan yang berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 97 pulau yang tersebar di tujuh Kecamatan.



Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
1. Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	7
2. Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	-
3. Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	-
4. Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	15
5. Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	1
6. Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	3
7. Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	-
8. Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	1
9. Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	59
10. Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	11
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	97

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Secara Administrasi 10 Kecamatan di Kabupaten Bulungan di bagi menjadi 81 Kelurahan dan Desa. Dilihat dari jumlah desa per kecamatan ada dua hal yang menarik, pertama kesenjangan luas desa relatif sangat besar, kedua selama lima tahun terakhir tidak terjadi pemekaran desa dalam kecamatan yang wilayahnya luas (BPS, Kabupaten Bulungan, 2020) sebagai Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.2 Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Des/Kel	Proporsi luas Desa (%)
Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	3	0,50%
Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	10	2,38%
Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	6	2,07%
Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	22	0,69%
Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	9	1,48%



Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Des/Kel	Proporsi luas Desa (%)
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	5	1,62%
Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	3	1,58%
Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	8	1,21%
Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	6	1,02%
Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	9	0,57%
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	81	100,00%

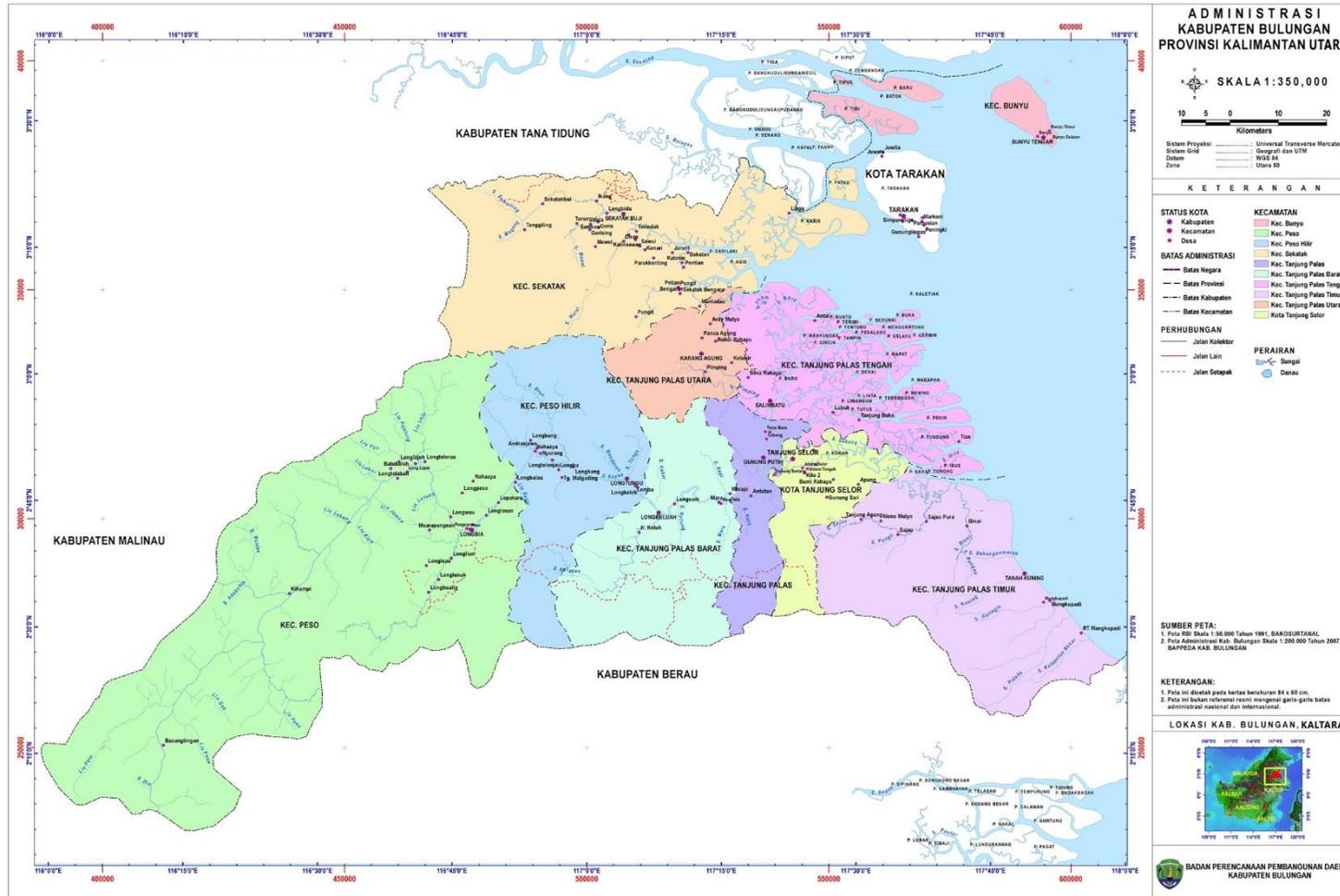
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan,2024

Pemerataan Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bulungan masih menghadapi permasalahan isolasi wilayah. Dampaknya, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih terisolir belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya untuk infrastruktur dasar. Indikator yang digunakan untuk menilai status isolasi wilayah adalah letak geografis yang berhubungan dengan infrastruktur perhubungan, dan proporsi rata-rata luas wilayah desa. Berdasarkan indikator tersebut, desa-desa yang terisolasi terdapat di Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat.

Pemekaran jumlah desa untuk kecamatan dengan rata-rata proporsi luas desa >1,5% perlu didorong, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menurunkan derajat isolasi wilayah. Rata-rata proporsi luas desa yang ideal berdasarkan data empiris untuk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1% dari luas wilayah kabupaten yang mencapai 13.181,92 km². Jadi ada lima kecamatan di Kabupaten Bulungan yang layak melakukan penambahan jumlah desa, tentunya dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Sehingga, pemekaran jumlah desa tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bulungan



Secara morfologi di wilayah Kabupaten Bulungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) satuan morfologi, yaitu: satuan morfologi dataran dan satuan morfologi perbukitan bergelombang. Satuan morfologi dataran menempati wilayah berketinggian antara 0-50 m dpl, dicirikan oleh kemiringan lereng $<10^{\circ}$. Batuan pembentuk satuan morfologi ini terutama adalah endapan aluvium pantai dan sungai, dengan pola aliran sungai anastomatik, yang mencerminkan tingkat erosi dewasa. Sedangkan morfologi perbukitan bergelombang berkembang di daerah dengan ketinggian antara 50 – 1600 m dpl, dengan kemiringan lereng antara 10° – 40° . Batuan pembentuk satuan morfologi ini sebagian besar adalah satuan batuan sedimen dan vulkanik. Pola aliran sungai yang berkembang berbentuk dendritik – sub dendritik yang mencerminkan bahwa tahap erosi muda menuju dewasa.

Terkait dengan klimatologi, wilayah Kabupaten Bulungan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2023 sebesar 227,63 mm/bulan, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 357,80 mm/bulan dan terendah pada bulan Oktober sebesar 86,90 mm/bulan. Rata-rata hari hujan selama tahun 2023 tercatat 18 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan September yaitu 24 hari dan terendah pada bulan Juni, Agustus, dan Oktober dengan masing-masing sebanyak 14 hari.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2023 sebesar 84,71%, tertinggi 86,10% pada bulan Januari dan terendah 83,50% pada bulan Juli. Temperatur berkisaran pada interval antara suhu minimal 22,500C pada Bulan April dan suhu maksimum 36,200C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,700C. Kondisi iklim menunjukkan gejala suhu yang semakin panas dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata suhu hanya mencapai 27,230C. Dengan demikian terjadi isu perubahan iklim yang lebih cepat dan perlu disikapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.



Tabel 2.3. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari 2023

BULAN	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	224,90	20	3,1
Februari	219,10	17	3,6
Maret	227,70	22	4,2
April	357,80	18	4,7
Mei	320,70	22	5,1
Juni	97,70	14	5,3
Juli	330,30	17	6,0
Agustus	161,30	14	5,7
September	355,20	24	5,6
Oktober	86,90	14	5,5
November	170,30	15	5,4
Desember	179,70	19	3,7
Rata-rata	227,63	20,583	4,82

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Tabel 2.4 Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kabupaten Bulungan Tahun 2023

BULAN	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)
	Rata-rata	Max	Min		
Januari	27,00	35,00	22,90	86,10	1008,60
Februari	26,90	33,60	23,00	85,40	1009,20
Maret	27,30	34,00	23,00	85,00	1009,90
April	27,70	34,70	22,50	84,70	1008,60
Mei	27,90	35,60	22,80	85,80	1009,40
Juni	27,80	35,20	23,20	83,50	1009,20
Juli	28,00	36,00	23,00	83,90	1009,80
Agustus	27,80	35,20	23,00	84,00	1009,30
September	28,20	36,20	24,20	84,00	1010,20
Oktober	28,10	35,50	23,00	83,60	1009,20
November	27,80	35,20	23,20	83,50	1009,20
Desember	27,80	35,90	23,80	85,70	1009,60
Rata-rata	27,70	35,22	23,19	84,71	1009,34

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2024



2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan sebanyak 165.775 jiwa. Dari 165.775 jiwa, 38,36 persen penduduk berada di Kecamatan Tanjung Selor dan hanya 2,52 persen penduduk berada di Kecamatan Peso Hilir. Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,80 persen

Tabel 2.5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun			
	2010	2020	2021	2022	2023	2010-2019	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Bunyu	11.139	11.689	11.813	11.972	11.958	0,40	1,42	1,35	0,52
Peso	4.327	4.400	4.433	4.479	4.294	-0,80	1,00	1,04	0,83
Peso Hilir	3.484	4.134	4.145	4.168	4.185	1,10	0,35	0,55	1,52
Sekatak	9.278	10.824	10.855	10.899	11.961	-0,40	0,16	0,41	4,47
Tanjung Palas	14.029	17.556	17.694	17.884	18.533	2,00	1,05	1,07	1,43
Tanjung Palas Barat	5.832	6.416	6.450	6.502	6.922	1,10	0,71	0,81	1,39
Tanjung Palas Tengah	7.527	11.567	11.892	12.261	12.439	4,10	3,76	3,10	0,84
Tanjung Palas Timur	8.651	18.020	18.724	19.512	20.169	5,90	5,24	4,21	6,17
Tanjung Palas Utara	8.954	10.651	10.682	10.744	11.726	1,70	0,39	0,58	1,62
Tanjung Selor	39.439	56.569	57.770	59.172	63.588	3,20	2,84	2,43	3,39
Total Kab. Bulungan	112.660	151.844	154.458	157.593	165.775	2,40	2,30	2,03	2,80

Sumber : Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2024

Berdasarkan aspek distribusi penduduk, Kecamatan Tanjung Selor merupakan wilayah yang menampung jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh kecamatan Tanjung Palas Timur dan Tanjung Palas. Tetapi berdasarkan kepadatan penduduk, Kecamatan Bunyu menduduki peringkat kedua sebagai wilayah kecamatan yang berpenduduk padat setelah Kecamatan Tanjung Selor.



Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 mencapai 13 jiwa/km². Selain itu, rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 118,7 yang berarti bahwa pada tahun 2023 diantara 100 perempuan terdapat 118-119 laki-laki di Kabupaten Bulungan (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Distribusi dan Ratio Jenis Kelamin Penduduk pada masing-masing Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan (org) Penduduk/km ²				Ratio Jenis Kelamin L/P			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Bunyu	58,94	60	60	60	113,7	113	112	116,1
Peso	1,40	1	1	1	127,3	127	128	107,9
Peso Hilir	2,52	3	3	3	128,7	129	130	109,5
Sekatak	5,44	5	5	6	116,4	116	117	113,4
Tanjung Palas	10,00	10	10	11	110,8	111	110	111,0
Tanjung Palas Barat	6,03	6	6	7	117,7	117	117	107,0
Tanjung Palas Tengah	18,51	19	20	20	112,3	112	111	106,4
Tanjung Palas Timur	14,10	15	15	16	131,4	132	133	111,9
Tanjung Palas Utara	13,21	13	13	15	110,1	110	109	106,2
Tanjung Selor	83,46	85	87	94	110,9	110	110	113,7
Total Kab. Bulungan	11,52	12	12	13	115,0	115	114	118,7

Sumber : BPS, Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2024,

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator - indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum.



2.2.1.1. PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 25,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 7,23 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan pada tahun 2023, mencapai 13,178 triliun rupiah, naik sebesar 0,58 triliun rupiah dari 12,599 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen.

Semua lapangan usaha ekonomi tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2023 yaitu Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,46 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah selama tahun 2023 adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,89 persen.

Meningkatnya peranan sektor Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor merupakan salah satu efek yang ditimbulkan karena pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan mengingat statusnya sebagai Ibukota Provinsi.



Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	175.529	180.619	185.858	191.248	196.794
Proyeksi Kepadatan Penduduk	12,60	12,97	13,35	13,73	14,13

Sumber : BPS, Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2024, Olah Data

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2020 digunakan sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun hasil proyeksi demografi Kabupaten Bulungan secara umum dapat dilihat pada tabel 2.7.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan diproyeksikan naik setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,9 persen selama 20 tahun ke depan. Pertumbuhan jumlah penduduk juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan Proyek Strategis Nasional kawasan industri tanah kuning dan tanjung selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini akan memengaruhi kondisi demografis di Kabupaten Bulungan dan memerlukan penyesuaian kebijakan untuk tetap memanfaatkan bonus demografi secara optimal.



Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.849,44	15,53	3.079,96	16,44	3.259,84	16,11	3.541,66	14,61	3.733,88	14,60
B. Pertambangan dan Penggalian	4.981,72	27,16	4.734,92	25,27	5.448,33	26,92	8.072,13	33,30	7.942,34	31,05
C. Industri Pengolahan	2.547,41	13,89	2.623,88	14,00	2.771,82	13,69	3.003,85	12,39	3.177,38	12,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	0,04	7,78	0,04	8,18	0,04	9,12	0,04	11,42	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,10	0,07	13,11	0,07	13,85	0,07	15,12	0,06	16,09	0,06
F. Konstruksi	2.341,26	12,76	2.410,83	12,87	2.517,95	12,44	2.648,00	10,92	3.064,66	11,98
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.486,58	8,10	1.534,47	8,19	1.669,29	8,25	1.863,12	7,69	2.057,85	8,05
H. Transportasi dan Pergudangan	838,61	4,57	839,96	4,48	864,24	4,27	1.049,06	4,33	1.209,56	4,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	272,89	1,49	263,83	1,41	277,28	1,37	317,33	1,31	354,73	1,39
J. Informasi dan Komunikasi	437,80	2,39	494,66	2,64	544,71	2,69	613,68	2,53	662,60	2,59
K. Jasa Keuangan	148,63	0,81	158,46	0,85	176,64	0,87	200,67	0,83	230,58	0,90
L. Real Estate	187,95	1,02	191,96	1,02	203,87	1,01	219,18	0,90	229,53	0,90



Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
M,N. Jasa Perusahaan	20,17	0,11	21,83	0,12	23,05	0,11	25,48	0,11	27,48	0,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.292,79	7,05	1.334,39	7,12	1.359,90	6,72	1.456,70	6,01	1.562,27	6,11
P. Jasa Pendidikan	625,84	3,41	688,51	3,67	731,06	3,61	802,43	3,31	865,06	3,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,46	0,79	167,55	0,89	186,01	0,92	193,94	0,80	204,15	0,80
R,S,T,U. Jasa Lainnya	149,65	0,82	170,47	0,91	183,88	0,91	207,30	0,86	228,12	0,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.344,05	100	18.736.572	100	20,239,90	100	24.238,80	100	25.577,70	100

Sumber: Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2024



Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (miliar rupiah) 2019-2023

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.871,31	3,71	1.946,26	4,01	2.001,05	2,82	2.090,79	4,48	2.146,33	2,66
B. Pertambangan dan Penggalian	3.244,57	-0,81	3.107,87	-4,21	3.294,45	6,00	3.501,58	6,29	3.634,62	3,80
C. Industri Pengolahan	1.503,34	4,89	1.461,05	-2,81	1.493,87	2,25	1.542,41	3,25	1.556,18	0,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,26	5,22	5,86	11,50	6,25	6,62	6,68	6,84	8,04	20,46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,63	6,10	10,10	4,86	10,16	0,55	10,63	4,66	11,16	5,02
F. Konstruksi	1.381,99	10,26	1.341,17	-2,95	1.345,25	0,30	1.363,95	1,39	1.525,13	11,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	940,28	8,71	951,41	1,18	1.016,22	6,81	1.103,37	8,58	1.170,79	6,11
H. Transportasi dan Pergudangan	533,80	8,00	520,67	-2,46	527,85	1,38	577,07	9,32	606,66	5,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,92	8,02	143,64	-5,45	148,54	3,41	164,07	10,46	177,93	8,45
J. Informasi dan Komunikasi	356,51	6,17	378,50	7,73	407,75	7,73	436,79	7,12	459,84	5,28



Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
K. Jasa Keuangan	93,05	5,39	94,14	1,16	100,79	7,06	109,69	8,83	124,31	13,33
L. Real Estate	151,33	6,68	152,61	0,84	157,30	3,07	166,03	5,55	171,75	3,44
M,N. Jasa Perusahaan	13,32	4,96	13,25	-0,52	13,58	2,51	14,49	6,66	15,23	5,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	759,76	7,99	763,90	0,54	764,79	0,12	787,83	3,01	812,28	3,10
P. Jasa Pendidikan	417,85	10,30	443,43	6,12	461,87	4,16	482,62	4,49	506,53	4,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,90	7,02	111,12	11,23	121,80	9,62	123,48	1,38	125,92	1,97
R,S,T,U. Jasa Lainnya	94,82	9,64	102,06	7,63	108,28	6,09	117,97	8,95	125,79	6,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.628.631	4,70	11.547,04	-0,70	11.979,80	3,75	12.599,44	5,17	13.178,49	4,60

Sumber: Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2024



Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Bulungan mencapai 25,578 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2023 (PDRB ADHK 2010) mencapai 13,178 triliun rupiah. Dilihat dari distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2023, sebesar 31,05 persen berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Tiga sektor tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2023 di Kabupaten Bulungan antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,60 persen); Industri Pengolahan (12,42 persen); dan Konstruksi (11,98 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 adalah 4,60 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Kabupaten Bulungan tahun 2023 berasal dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,46 persen, Jasa Keuangan dan Transportasi sebesar 13,33 persen, dan Konstruksi sebesar 11,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 dipercepat oleh adanya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung perkantoran, rehabilitasi gedung sekolah dan lainnya. Kegiatan informasi dan komunikasi juga mendorong perekonomian Kabupaten Bulungan. Selain itu bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan minimarket juga membantu meningkatnya daya beli masyarakat bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk karena banyaknya pendatang di Bulungan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bulungan.

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2	2019	18.344,05	11.628,63
3	2020	18.736,05	11.547,04
4	2021	20.341,96	12.002,79
5	2022	24.222,78	12.639,47
6	2023	25.577,70	13.178,49

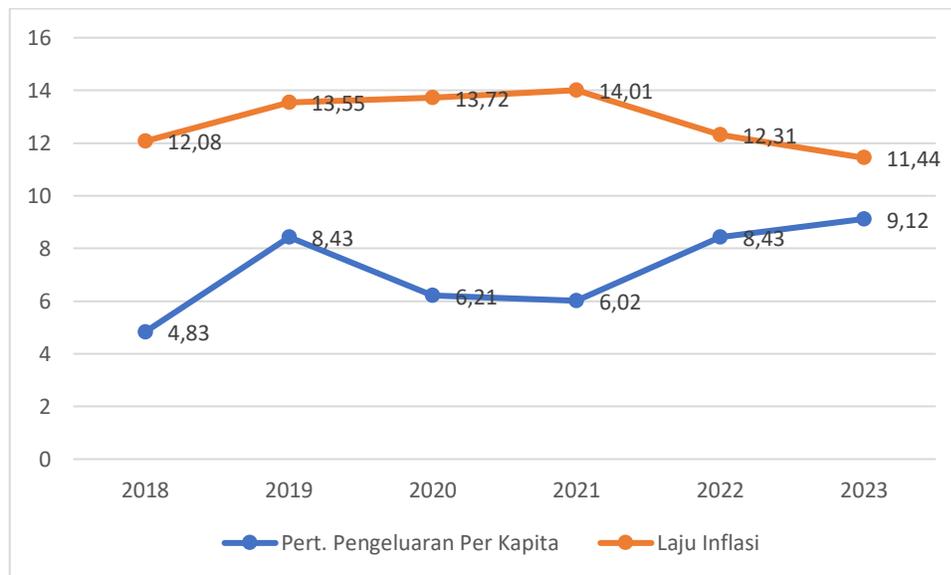
Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Berdasarkan data diatas PDRB Kabupaten Bulungan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 telah mengalami penikatan dari tahun sebelumnya yaitu, sebesar Rp. Rp. 25.577,70 Milyar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp. 24.222,78 Milyar sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 12.639,47 Milyar dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.178,49 Milyar.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan kumulatif pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Bulungan

Berdasarkan data diatas bahwa daya beli masyarakat dalam lima tahun terakhir meningkat sebesar 8,43% atau rata-rata 2,11% pertahun. Tetapi pada sisi lain, dalam kurun waktu yang



sama terjadi inflasi sebesar 13,55% dalam lima tahun atau rata-rata 3,39% per tahun. Jadi bila inflasi diperhitungkan dalam peningkatan daya beli masyarakat, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bulungan justru mengalami penurunan sebesar 5,12% dalam kurun lima tahun atau rata-rata menurun 1,28% per tahun. Artinya kemampuan ekonomi masyarakat tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan pengembangan SDM di daerah ini.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atss dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 128,51 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 120,67 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan inflasi, secara nominal nilai PDRB atas Dasar harga konstan per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 79,94 juta rupiah menjadi 81,76 juta rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2023 menjadi 79,81 juta rupiah

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB/GRDP (Triliun Rupiah/Trillion rupiahs)							
- ADHB/at current price	12,98	13,63	15,27	16,76	18,26	24,24	25,58
- ADHK/at 2010 Constant Price	9,72	10,00	10,57	11,10	11,62	12,63	13,17
PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)							
- ADHB/at current price	100,29	102,88	112,43	120,67	128,51	154,39	181,83



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
- ADHK/at 2010 Constant Price	75,10	75,43	77,86	79,94	81,76	80,44	79,81
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	129	133	136	130	142	157	165
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	2,61	2,44	2,44	2,29	2,34	2,67	2,80

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Ket : * Angka Sementara/preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara/very preliminary Figures

2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan pada Maret 2023 sebesar 12,19 ribu orang (8,99 persen), turun dibanding Maret 2022 yang sebesar 12,58 ribu orang (9,32 persen). Selama periode Maret 2022-Maret 2023, penduduk miskin berkurang sekitar 390 orang atau 0,33 persen.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selama 2019-2023 garis kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 551.925,- per kapita per bulan. Naik dibandingkan Maret 2022 sebesar Rp 514.320,- per kapita per bulan.



Tabel 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan

Tahun	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06
2021	486.524	13,48	10,03
2022	514.320	12,58	9,32
2023	551.925	12,19	8,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Bulungan sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Kabupaten Bulungan rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 71,56 pada tahun 2020 menjadi 73,20 pada tahun 2023.

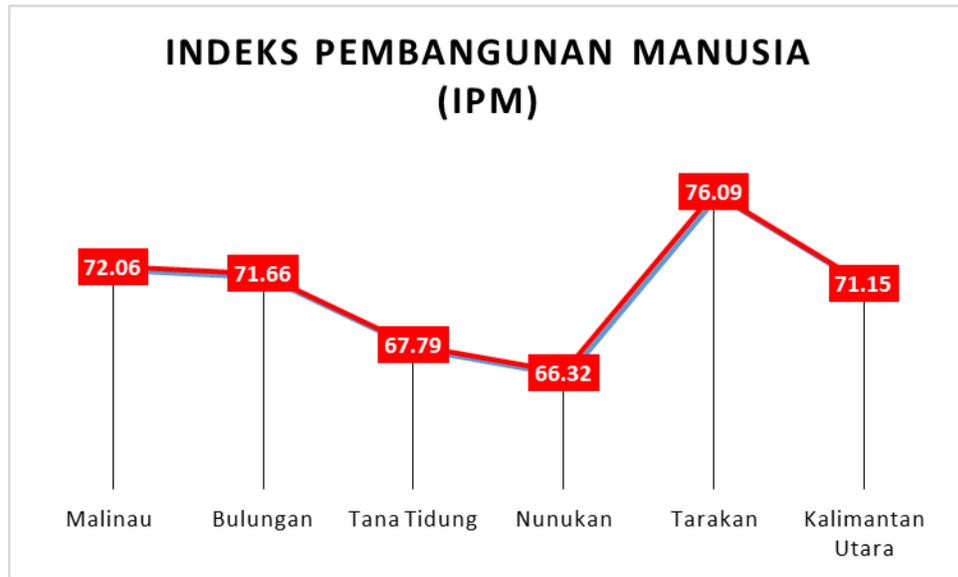
Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2019	71,66
2020	71,56
2021	72,27
2022	72,56
2023	72,20

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Gambar 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

Tabel 2.14 Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indikator IPM						
Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	72,6	73,68	73,78	73,80	73,83
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,99	13,00	13,01	13,03	13,04
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	8,93	8,94	9,19	9,20	9,21
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000Rp)	Rp.000	9.648	9.121	9.423	9.641	10.205

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,15 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,04 persen per tahun. Pada tahun 2019, UHH di Bulungan sebesar 72,60 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 73,83 tahun.



Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Bulungan telah meningkat 0,04 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,27 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Bulungan mencapai Rp10,205 juta per tahun. Capaian ini meningkat 564 ribu rupiah (5,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya) terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data bahwa terdapat 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf latin lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 96,44 persen untuk laki-laki dan 94,02 persen untuk perempuan. Terdapat 98.14 persen penduduk yang mampu membaca dan menulis yang berasal dari golongan pengeluaran 40 persen tengah.



Tabel 2.15 Persentase penduduk 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	96,19	11,76
Perempuan	94,23	12,58
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	94,36	5,72
40 Persen Tengah	98,14	15,54
20 Persen Teratas	91,40	16,39
Kabupaten Bulungan	95,28	12,14

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Variabel angka rata-rata lama sekolah (ALS) merupakan indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga merupakan komponen IPM. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara (2021) peningkatan atau penambahan ALS untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir (2017-2021) belum mencapai satu tahun, dari 8,29 tahun (2017) menjadi 8,93 tahun (2021). Laju pertumbuhan ALS selama lima tahun hanya 7,72% atau rata-rata pertumbuhannya 1,93% per tahun. Sedangkan untuk mencapai target ALS tahun 2019, yaitu 9,27 tahun, maka rata-rata pertumbuhan ALS harus mencapai 2,96% per tahun.

Berdasarkan data tersebut bahwa capaian kinerja pertumbuhan ALS di kabupaten Bulungan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, karena dalam dokumen RPJMD 2016-2021 di targetkan pertumbuhan ALS rata-rata adalah 2,96% per tahun, namun kinerja yang terjadi baru mencapai 1,93% per Tahun, berarti kinerja pertumbuhan ALS selama lima tahun terakhir secara rata-rata baru mencapai 65,20% dari target yang ditetapkan.

Kinerja pendidikan di Kabupaten Bulungan belum dapat mendorong masyarakat untuk berkolah lebih lama atau meningkatkan tarap pendidikannya, sampai dengan tahun 2019 baru mencapai tingkat setara dengan SMP dan belum semuanya lulus (baru 8,93 tahun). Dua tahun sebelumnya (2017-2018) capaian ALS di Kabupaten Bulungan lebih tinggi dari rata-rata tingkat Provinsi Kalimantan Utara, meskipun masih di atas capaian rata-rata nasional. Capaian kinerja ALS



di Kabupaten Bulungan posisinya berada di tengah-tengah, dibawah Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, tetapi masih diatas Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung.

Tabel 2.16 Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bulungan	8,43	8,75	8,92	8,93	9,01	9,27
Malinau	8,56	8,88	9,04	9,05	9,02	9,13
Nunukan	7,57	7,65	7,73	7,81	7,82	8,21
Tana Tidung	8,11	8,23	8,49	8,53	8,51	8,62
Tarakan	9,92	9,93	9,94	9,96	9,97	9,98
Kalimantan Utara	8,49	8,62	8,87	8,94	8,99	9,14

Sumber : BPS Prov Kalimantan Utara, 2024

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bulungan tahun 2023 menurut jenjang pendidikan sebesar 93,60 (SD/MI), 78,66 (SMP/MTs), 65,28 (SMA/SMK/MA). Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bulungan tahun 2023 menurut jenjang pendidikan sebesar 99,41 (SD/MI), 100,16 (SMP/MTs), 101,80 (SMA/SMK/ MA). Nilai APK untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Bulungan tahun 2023 mencapai 97,98 persen. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.



Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

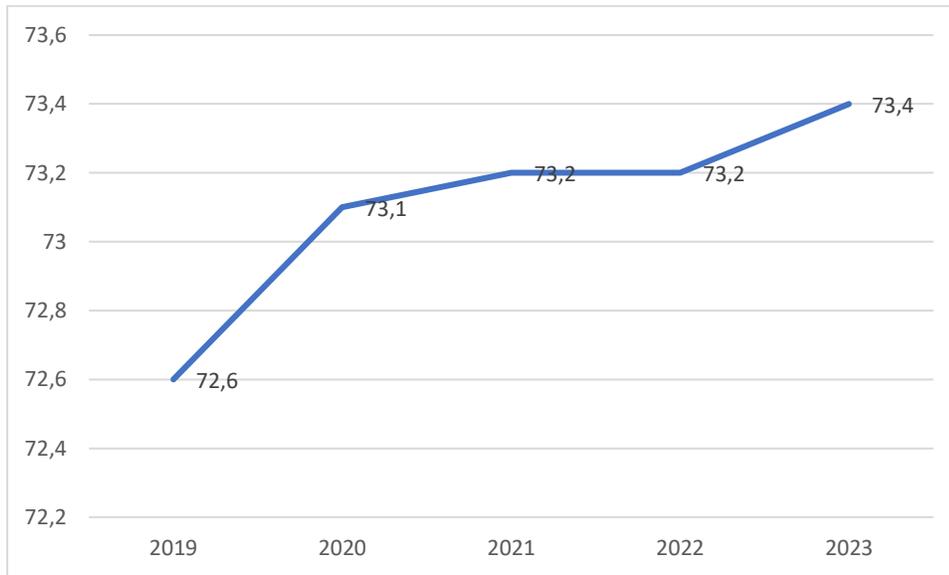
Karakteristik	2019	2020	2021	2022	2023
APM					
SD/MI	90,81	90,33	90,53	92,13	93,60
SMP/MTs	75,97	74,92	75,18	74,85	78,66
SMA/SMK/MA	64,84	64,41	64,5	64,47	65,28
APK					
SD/MI	101,5	99,78	100,,34	100,1	99,41
SMP/MTs	95,31	102,69	101,65	96,73	100,16
SMA/SMK?MA	94,73	94,38	98,32	100,38	101,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

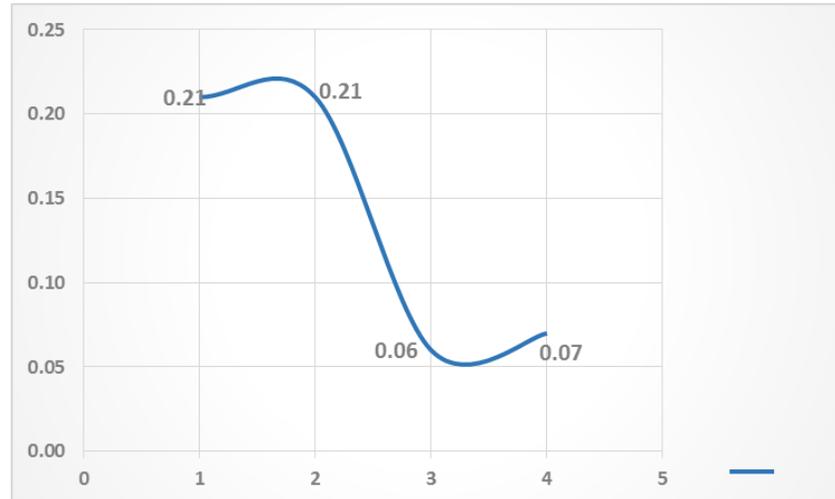
Indikator yang menjadi elemen kinerja pengembangan SDM adalah angka harapan hidup (AHH). Target kinerja pembangunan untuk AHH dalam lima tahun akan meningkat sebesar 0,9% atau rata-rata 0,18% per tahun. Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa peningkatan AHH baru mencapai 0,54% selama empat tahun atau rata-rata 0,14% pertahun (Gambar 2.1). Jadi capaian kinerja AHH Kabupaten Bulungan hingga tahun 2019 baru mencapai 60%.

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan AHH ini adalah laju perkembangan justru cenderung menurun (Gambar3.2), dengan rata-rata laju pertumbuhan selama empat tahun 0,14%, ternyata hanya laju pertumbuhan tahun pertama dan kedua yang tinggi, mencapai 0,21%. Tetapi laju pertumbuhan tahun ketiga hanya mencapai 0,06% dan naik sedikit pada tahun keempat menjadi 0,07%. Sehingga secara umum laju pertumbuhan AHH mengalami perlambatan atau cenderung menurun.



Gambar 2.4 Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2019-2023

sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024



Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024

Data dukung untuk AHH yang menarik untuk diperhatikan adalah berkaitan dengan berat badan bayi saat dilahirkan. Oleh karena itu bayi yang dilahirkan dengan berat di bawah normal akan tumbuh menjadi individu dengan tingkat kesehatan yang tidak optimal, dan akhirnya akan



mempengaruhi AHH yang bersangkutan. Data statistik Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa ada sekitar 18% bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bulungan mempunyai bobot < 2,5 kg.

Tabel 2.18 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang dilahirkan terakhir, 2022.

Karakteristik	< 2,5 kg	≥ 2,5 kg	Tidak Ditimbang	Jumlah
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	15,370	84,630	0,000	100,000
40% tengah	5,510	94,490	0,000	100,000
20% teratas	33,720	45,950	20,330	100,000
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	20,320	79,680	0,000	100,000
SMP ke atas	14,970	78,740	6,290	100,000
Kabupaten Bulungan	17,978	76,698	5,324	100,000

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Jika diperhatikan lebih cermat data tersebut diketahui , bayi yang lahir dengan berat <2,5 kg ternyata terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak miskin dan pendidikannya tidak rendah. Berdasarkan data tersebut berarti masyarakat kelompok pengeluaran 20% terjadi perkembangan pola konsumsi yang tidak sehat, dan terjadi pola salah asuh pada konsumsi anak sehingga memunculkan generasi dengan kualitas kesehatan yang rendah. Lebih lanjut, jika ditinjau dari tingkat pendidikan, ternyata kelompok masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dari tingkat SMP masih menghasilkan generasi “yang beresiko kesehatan” sekitar 15% (Tabel 2.13). Mungkin perlu dimasukkan lagi pendidikan “kesejahteraan keluarga” di tingkat SMP dan SMA sebagai program tidak lanjutnya.

2.2.2.5. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti cuti. Disamping itu, mereka yang tidak



mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan pada tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.19 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bulungan 2020-2022

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023**
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,38	68,62	64,24	65,1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45	4,54	5,03	4,41
3	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,88	95,43	96,12	97,12

Ket : ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2023

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 66,66 persen. Hal demikian terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari 5,12 persen menjadi 4,57 persen di tahun 2021, sedangkan Tingkat Kesempatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 94,88 persen menjadi 95,43 persen di tahun 2021, dan pada tahun 2023 pada angka sangat sementara mencapai 97,12. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai indikator tersebut mengalami penurunan maka kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja semakin rendah.

2.3. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 yang mencakup seluruh Provinsi



dan Kabupaten Kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh BRIN tersebut, Kabupaten Bulungan memiliki skor IDSD yang cukup besar namun secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Utara masih berada dibawah nilai IDSD Kota Tarakan, dan berada diatas nilai rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara. Nilai IDSD Kabupaten Bulungan meskipun masih berada dibawah nilai IDSD Provinsi namun hanya selisih 0,02 dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Utara, atau mendekati nilai IDSD Provinsi.

Kabupaten Bulungan memiliki nilai IDSD tertinggi pada pilar 8 dan pilar 11, dimana masing-masing adalah terkait dengan Pasar Tenaga Kerja pada pilar 8, dan DInamisme Bisnis pada pilar ke-11.



Tabel 2.20 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

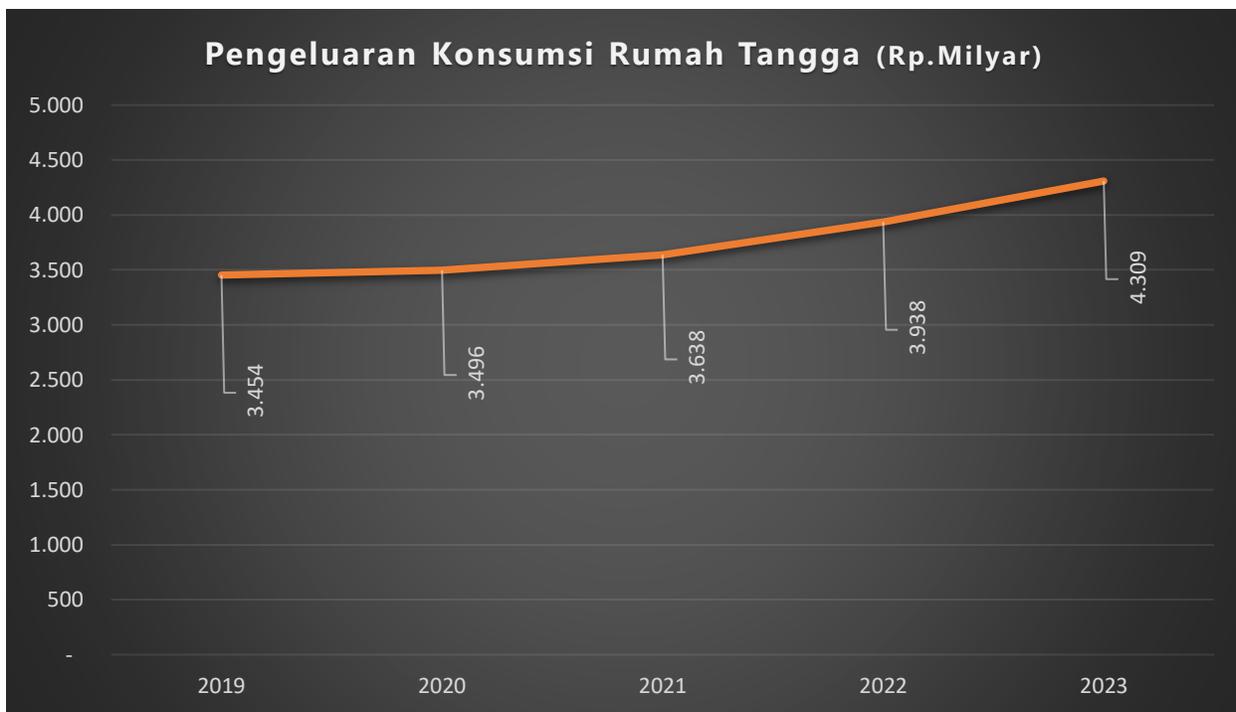
Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM				PASAR				SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Kalimantan Utara	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
Rata-rata Kab.Kota	4,30	1,94	3,86	3,41	4,01	3,53	1,79	4,15	0,42	4,16	3,35	1,33	3,08
Malinau	4,25	1,35	2,96	3,51	3,96	3,34	1,11	3,44	0,25	4,04	4,43	0,92	2,80
Bulungan	4,22	2,14	3,51	3,65	4,05	3,59	1,97	4,65	0,51	4,21	4,48	1,82	3,23
Tana Tidung	-	1,70	4,17	3,21	3,94	3,40	1,07	4,41	0,17	3,70	2,67	0,49	-
Nunukan	4,36	2,01	3,71	3,46	3,96	3,26	0,85	3,99	0,47	4,35	2,53	0,89	2,82
Kota Tarakan	4,37	2,50	4,95	3,23	4,16	4,07	3,97	4,25	0,72	4,50	2,63	2,53	3,49

Sumber : IDSD BRIN, 2023



Dari aspek daya saing ekonomi daerah terlihat dari tingkat pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita disampaikan pada grafik berikut,

Gambar 2.6 Konsumsi Rumah Tangga 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19, struktur perekonomian di Kabupaten Bulungan tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 31,05 persen (meningkat dari 27,16 persen pada tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,60 persen (menurun dari 15,53 persen pada tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,42 persen (menurun dari 13,89 persen pada tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,98 persen (menurun dari 12,76 persen pada tahun 2019) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,05 persen (menurun dari 8,10 persen pada tahun 2019).

Semua lapangan usaha ekonomi tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2023 antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,46 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen, dan Konstruksi sebesar 11,82 persen. Pertumbuhan ketiga lapangan usaha ini cenderung tinggi di antara lapangan usaha lain yang hanya tumbuh dibawah sembilan persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah selama tahun 2023 adalah Industri Pengolahan sebesar 0,89 persen.



Tabel 2.21 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No.	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.849.438,58	3.079.963,00	3.259.844,23	3.541.663,97	3.733.879,30
	Pertambangan dan Penggalian	4.981.723,18	4.734.925,00	5.448.333,48	8.072.133,63	7.942.341,88
	Industri	2.547.409,67	2.623.878,00	2.771.824,61	3.003.848,04	3.177.379,77
	Pengadaan Listrik dan Gas	6.739,18	7.797,00	8.180,81	9.123,87	11.423,69
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.096,46	13.106,00	13.849,30	15.122,73	16.088,84
	Konstruksi	2.341.259,58	2.410.829,00	2.517.951,96	2.648.001,08	3.064.659,31
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.486.582,08	1.534.469,00	1.669.285,24	1.863.124,96	2.057.848,19
	Transportasi dan Pergudangan	838.613,28	839.957,00	864.239,82	1.049.056,88	1.209.558,42
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	272.892,23	263.830,00	277.282,16	317.331,94	354.727,57
	Informasi dan Komunikasi	437.804,64	494.656,00	544.705,31	613.681,68	662.595,40
	Jasa Keuangan	148.632,59	158.465,00	176.644,62	200.673,89	230.580,12
	Real Estate	187.952,11	191.956,00	203.865,91	219.179,09	229.534,18
	Jasa Perusahaan	20.174,14	21.827,00	23.045,64	25.482,04	27.484,19
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.292.790,12	1.334.388,00	1.359.897,20	1.456.704,94	1.562.266,42
	Jasa Pendidikan	625.835,49	688.507,00	731.060,19	802.433,93	865.055,06
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.455,01	167.549,00	186.009,99	193.940,48	204.151,46
	Jasa Lainnya	149.648,57	170.472,00	183.875,65	207.297,17	228.122,53
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.344.046,92	18.736.572,00	20.239.896,13	24.238.800,33	25.577.696,33

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Tabel 2.22 Distribusi PDRD atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha DI Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

No.	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,53	16,44	16,11	14,61	14,6
	Pertambangan dan Penggalian	27,16	25,27	26,92	33,3	31,05
	Industri	13,89	14	13,69	12,39	12,42
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
	Konstruksi	12,76	12,87	12,44	10,92	11,98
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,1	8,19	8,25	7,69	8,05
	Transportasi dan Pergudangan	4,57	4,48	4,27	4,33	4,73
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,41	1,37	1,31	1,39
	Informasi dan Komunikasi	2,39	2,64	2,69	2,53	2,59
	Jasa Keuangan	0,81	0,85	0,87	0,83	0,9
	Real Estate	1,02	1,02	1,01	0,9	0,9
	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,05	7,12	6,72	6,01	6,11
	Jasa Pendidikan	3,41	3,67	3,61	3,31	3,38
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,89	0,92	0,8	0,8
	Jasa Lainnya	0,82	0,91	0,91	0,86	0,89
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Tabel 2.23 Distribusi PDRD atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha DI Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
-	Atas Dasar Harga Berlaku	137,75	123,79	131,81	155,55	161,83
-	Atas Dasar Harga Konstan	87,32	76,29	78,02	80,86	83,38
	Pertumbuhan PDRD Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	9,19	-12,64	2,26	3,63	3,12

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita per tahun Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 161,83 juta rupiah, meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 155,55 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan faktor inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 80,86 juta rupiah menjadi 83,38 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini tak lepas dari pengaruh dari kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan yang mampu tumbuh searah dengan bertambahnya jumlah penduduk

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Salah satu komponen terpenting dari pembangunan suatu daerah yaitu sumber daya manusia yang berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompentensi unggul.

Dimensi pengetahuan pada IPM terbentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Penghitungan harapan lama sekolah mencakup pendidikan untuk penduduk yang berusia mulai dari tujuh tahun ke atas, sementara penghitungan rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan program pendidikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas pada suatu daerah.



Selama periode 2018 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,05 tahun dari 12,98 tahun pada 2018 menjadi 13,03 tahun pada 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah dan semakin mudahnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,28 tahun dari 8,92 tahun pada 2018 menjadi 9,20 tahun pada 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulungan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Setiap tahunnya indikator pada dimensi pendidikan selalu tumbuh positif. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Bulungan yang lebih baik. Namun, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bulungan masih dibawah target wajib belajar yakni 12 tahun. Rata-rata siswa di Kabupaten Bulungan belum dapat mencapai masa kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendorong kinerja bidang pendidikan untuk lebih giat lagi. Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya aspek pendidikan formal hingga lulus SMA.

Tabel 2.24 Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	Rata-rata Lama Sekolah	12,99	13,00	13,01	13,03	
	Harapan Lama Sekolah	8,93	8,94	9,19	9,20	
	Angka Harapan Hidup	72,60	72,66	72,74	72,76	73,83

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan komponen dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan semakin membaik. Selama periode 2018 hingga 2022,



Kabupaten Bulungan telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 0,21 tahun dari 72,55 tahun pada 2018 menjadi 72,76 tahun pada 2022. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 72,76 tahun.

Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja da Kesempatan Kerja di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,21	67,38	68,62	64,24	71,86
	Tingkat Kesempatan Kerja	95,61	95,55	95,46	94,97	95,46

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Penduduk usia kerja di Kabupaten Bulungan tahun 2023 sebanyak 120.366 orang yang terdiri atas angkatan kerja sebanyak 86.492 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 33.874 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bulungan tahun 2023 mencapai 71,86 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,54 persen

Tabel 2.25 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (Orang) Tahun 2019-2023

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2019	2020	2021	2022	2023
	<= SD	23.885	24.196	24.209	24.177	28.543
	SMP Sederajat	8.652	9.736	10.019	9.147	13.714
	SMA Sederajat	20.544	21.117	22.508	19.039	29.299
	Perguruan Tinggi	11.451	11.313	11.510	12.124	14.936
	JUMLAH	64.532	66.362	68.246	64.487	86.492

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, angkatan kerja di Kabupaten Bulungan masih didominasi oleh lulusan SMA Sederajat sebanyak 29.299 orang atau 33,87 persen. Selain itu,



sebanyak 38.230 jiwa atau sebesar 46,30 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kabupaten Bulungan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

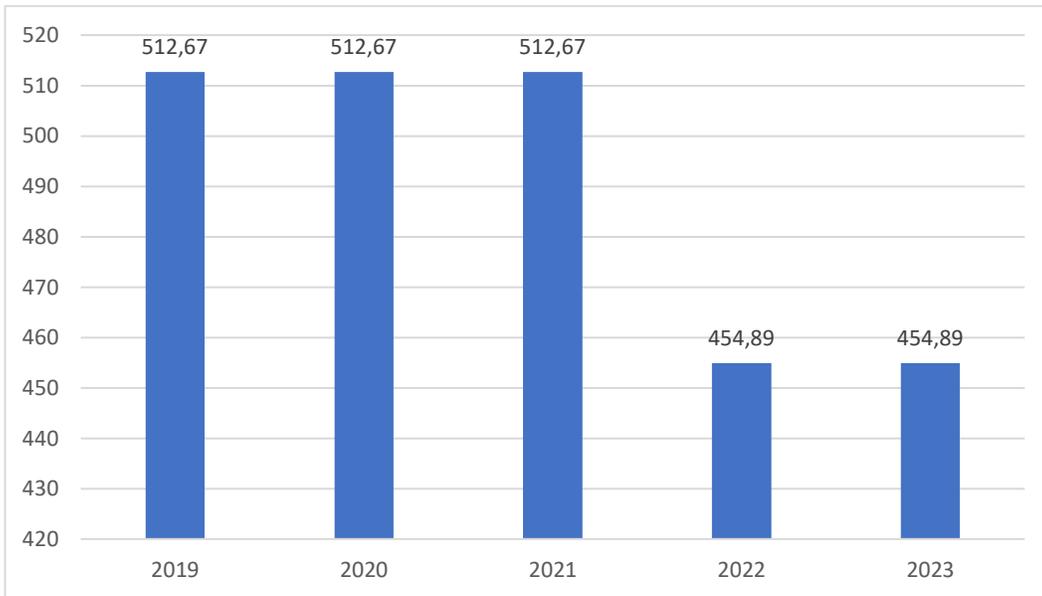
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

2.3.3.1. Aksesibilitas Daerah

Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain.

Panjang jalan Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 yang menjadi wewenang Kabupaten Bulungan mencapai 454,89 km. panjang jalan Kabupaten menurut rincian jenis permukaan adalah permukaan beraspal 231,60 km, jalan kerikil 107,52 km, permukaan tanah 81,42 km, dan jalan dengan permukaan lainnya 34,35 km. Persentase panjang jalan dengan permukaan aspal adalah yang paling besar pada tahun 2023 yaitu sekitar 50,91%. Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2023, jalan dalam kondisi baik sepanjang 181,44 km, sedangkan kondisi sedang 26,69 km, kondisi rusak 22,43 km dan dalam kondisi rusak berat 221,33 km.



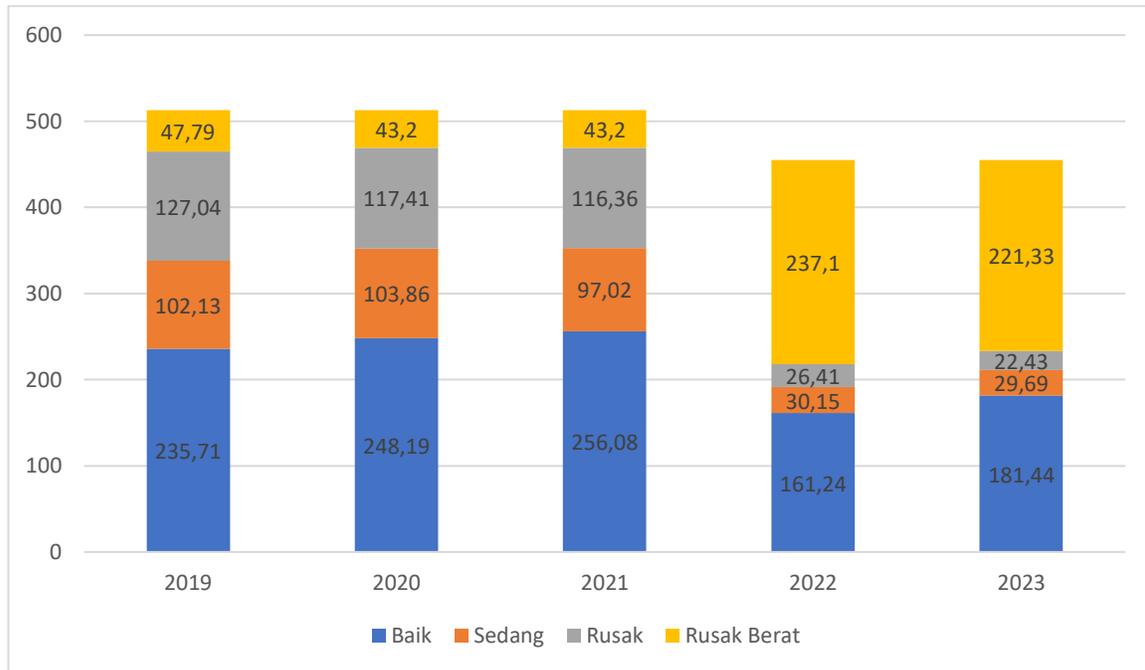
Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

2.3.3.2. Infrastruktur Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat, perkembangan ketersediaan air bersih di Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir masih fluktuatif dan cenderung meningkat pada empat tahun terakhir, meskipun peningkatannya masih relatif. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pada pembangunan mendatang, khususnya untuk penyediaan air minum yang layak berdasarkan standar kesehatan untuk masyarakat di pedesaan,



Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota dan Provinsi	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1 Bulungan	78,22	77,44	75,44	73,88	77,49
2 Malinau	68,04	80,76	70,85	74,65	73,56
3 Nunukan	91,63	90,12	85,46	94,42	93,43
4 Tana Tudung	78,68	81,23	85,88	93,15	95,61
5 Tarakan	98,13	98,98	98,73	99,64	99,91
Kalimantan Utara	87,90	89,50	86,80	89,96	90,19

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2024

Meskipun mengalami fluktuasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021. Di tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak sebesar 77,49%. Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2024, jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Benuanta terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Di tahun 2019, jumlah pelanggan PDAM sebesar 12.088 pelanggan. Sedangkan, di tahun 2023, jumlah pelanggan PDAM sudah mencapai 17.529 pelanggan.

2.3.3.3. Infrastruktur Energi Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat pada era digital saat ini, karena listrik tidak hanya sebagai sumber penerangan, tetapi juga merupakan prasarana dasar untuk kegiatan masyarakat bidang komunikasi dan industri yang merupakan kegiatan produktif masyarakat. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tersaji pada tabel 2.28.



Tabel 2.28 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023

Kab/Kota dan Provinsi	Sumber Penerangan Rumah Tangga		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1 Bulungan	94,22	5,51	0,27
2 Malinau	77,23	22,62	0,15
3 Nunukan	89,65	9,63	0,72
4 Tana Tudung	61,58	38,08	0,34
5 Tarakan	98,87	1,13	0,00
Kalimantan Utara	91,26	8,46	0,28

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2024

Meskipun ketersediaan listrik PLN di kabupaten Bulungan telah mencapai 94,22% dan hanya di bawah Kota Tarakan rankingnya di provinsi Kalimantan utara, tetapi durasi ketersediaan listrik dalam periode 24 jam ditengarai masih rendah, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan masih terjadi Kesenjangan.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan investasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi akan memberikan manfaat terhadap banyak pihak baik itu investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi daerah terkait iklim berinvestasi dapat dilihat dari indikator : Angka Kriminalitas, dan Kemudahan perijinan.



2.3.4.1. Angka Kriminalitas

Indikator Kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berikut dibawah ini tabel Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan tahun 2023.

Tabel 2.29 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan setiap tahunnya

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	181	162	169
Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk (%)	0,15	0,13	0,11
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	88,7	89,2	90,7
Selang waktu terjadinya tindak pidana	138 jam 722 menit 21 detik	151 jam 724 menit 71 detik	172 jam 426 menit 71 detik

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan setiap tahunnya mengalami penurunan sama halnya dengan persentase penyelesaian tindak pidana setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2023 90,7% kasus dapat diselesaikan dan pada tahun 2022 sebesar 89,2% kasus dapat diselesaikan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bulungan menggambarkan bahwa disiplin hukum di Kabupaten Bulungan berjalan dengan baik.

2.3.4.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyaknya faktor, salah satunya kemudahan perijinan .



Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1. Pendidikan

2.4.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 didominasi oleh karakteristik umur 7-12 Tahun. Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya APS pada usia sekolah lanjutan, terutama lanjutan tingkat atas (SMA).

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Bulungan 2021-2023

Kelompok Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur		
	2021	2022	2023
7-12	97,30	97,56	98,35
13-15	97,64	97,16	96,55
16-18	16,18	73,39	73,68

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Sekolah terbesar ada pada kelompok umur 7-12 tahun yang menandakan bahwa baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Terlihat pula bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin berkurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.



2.4.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31 Rasio Ketersediaan Sekolah

	Jumlah	Rasio
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah dasar (5-9 tahun)	16.096	
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	142	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		113,35
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah (10-14 tahun)	15.954	
Jumlah Sekolah Menengah (SMP)	63	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah		253,24
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah Atas (15-19 tahun)	13.466	
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	16	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan Atas		841,62

Sumber : Kabupaten Bulungan dalam Angka (2024) dan diolah (2024)

2.4.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapainya kualitas pembelajaran. Semakin sedikit angka rasio guru terhadap muridnya maka diharapkan pembnagunan pendidikan akan semakin membaik karena dengan sedikitnya murid yang di tangani oleh seorang guru diharapkan guru tersebut dapat lebih memperhatikan muridnya.



Rasio guru murid pada tahun ajaran 2023/2024 berada pada kisaran 10-12 untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat. Rasio guru murid paling kecil berada pada tingkat SMP/ sederajat sebesar 10,73 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10,65 yang berarti setiap guru harus menanggung 10-11 murid. Semakin kecil rasio guru murid akan semakin mudah pula pengawasan yang dilakukan guru terhadap muridnya tersebut sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin baik. Sebaliknya, rasio murid guru terbesar berada pada tingkat SD/ sederajat yaitu 12,73 yang berarti bahwa setiap satu orang guru SD/ sederajat harus menanggung sekitar 12-13 muridnya . Semakin banyak murid yang ditanggung maka akan semakin berat pula tugas guru untuk memperhatikan semua muridnya.

Tabel 2.32 Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2022/2023 dan 2023/2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru		Jumlah Murid		Rasio Guru-Murid	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
SD/Sederajat	1.441	1.476	18.176	18.798	12,61	12,73
SMP/Sederajat	705	696	7.511	7.469	10,65	10,73
SMA/Sederajat	312	315	3.537	3.688	11,33	11,71

Sumber : Kabupaten Bulungan dalam Angka (2024) dan diolah (2024)

2.4.1.4. Rasio Jumlah Murid dan Sekolah

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di Kabupaten Bulungan pada tahun 2023/2024 dibawah ini

Tabel 2.33 Jumlah murid, Jumlah Sekolah dan Rasio Murid dan Sekolah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid		Jumlah Sekolah		Rasio Murid-Sekolah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
SD/Sederajat	18.176	18.798	142	142	128,00	132,38
SMP/Sederajat	7.511	7.469	63	63	119,22	118,55
SMA/Sederajat	3.537	3.688	15	16	235,80	230,15

Sumber : Kabupaten Bulungan dalam Angka (2024) dan diolah (2024)



Rasio Murid Sekolah pada tahun 2023/2024 tertinggi pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat. Jenjang pendidikan SMA/ Sederajat rasio murid dan sekolah sebesar 230,15 yang artinya satu sekolah SMA/Sederajat menampung sekitar 230 siswa. Jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan rasio sebesar 132,38 angka ini berarti satu sekolah SD/Sederajat menampung sekitar 132 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat rasio jumlah murid dan sekolah sebesar 118,55 yang artinya satu sekolah SMP/Sederajat menampung sekitar 118 siswa.

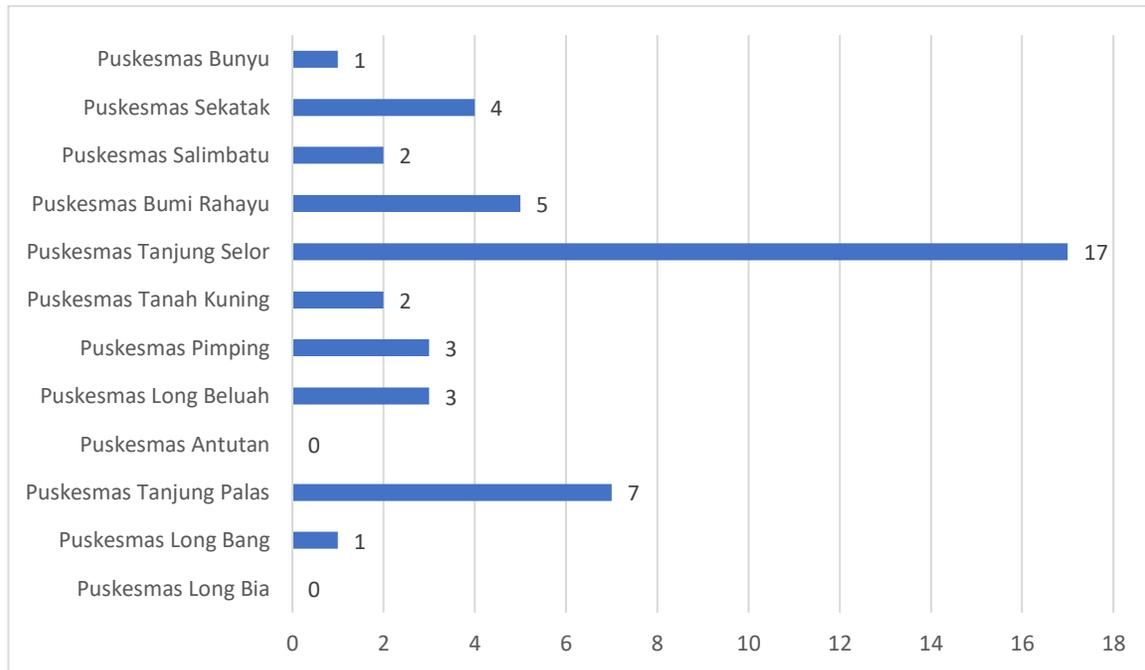
2.4.2. Aspek Kesehatan

2.4.2.1. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan di suatu daerah. Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB adalah gambaran status kelangsungan hidup di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh status kesehatan anak dan didukung oleh adanya status pelayanan kesehatan anak yang optimal.

AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKB merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Bila AKB disuatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Jika melihat dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa AKB di Kabupaten Bulungan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan dari data Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan Tahun 2023, tercatat pada tahun 2023 Angka Kematian bayi di Kabupaten Bulungan sebesar 15,96 per 1000 kelahiran hidup dengan 45 jumlah kasus kematian bayi dari 2.820 kelahiran hidup. Penurunan kasus kematian bayi di Kabupaten Bulungan tidak lepas dari banyaknya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk menurunkan angka kematian ini salah satunya dengan pemerataan sarana dan prasarana baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga, serta semakin memadainya akses dan pelayanan kesehatan pra dan pasca melahirkan, menyediakan layanan dan program yang mendukung kesehatan. Untuk melihat angka kematian bayi menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.10 Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan 2023
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Berdasarkan rekapitulasi laporan puskesmas se-Kabupaten Bulungan bahwa angka kematian tertinggi ada di wilayah Puskesmas Tanjung Selor sebesar 17 kasus dan wilayah Puskesmas Long Tanjung Palas sebesar 7 kasus. Untuk dua puskesmas dengan angka kematian terendah ada pada Puskesmas Long Bang dan Puskesmas Bunyu dengan masing-masing terdapat 1 kasus kematian bayi. Sedangkan untuk Puskesmas Antutan dan Puskesmas Long Bia tidak terdapat kasus kematian.

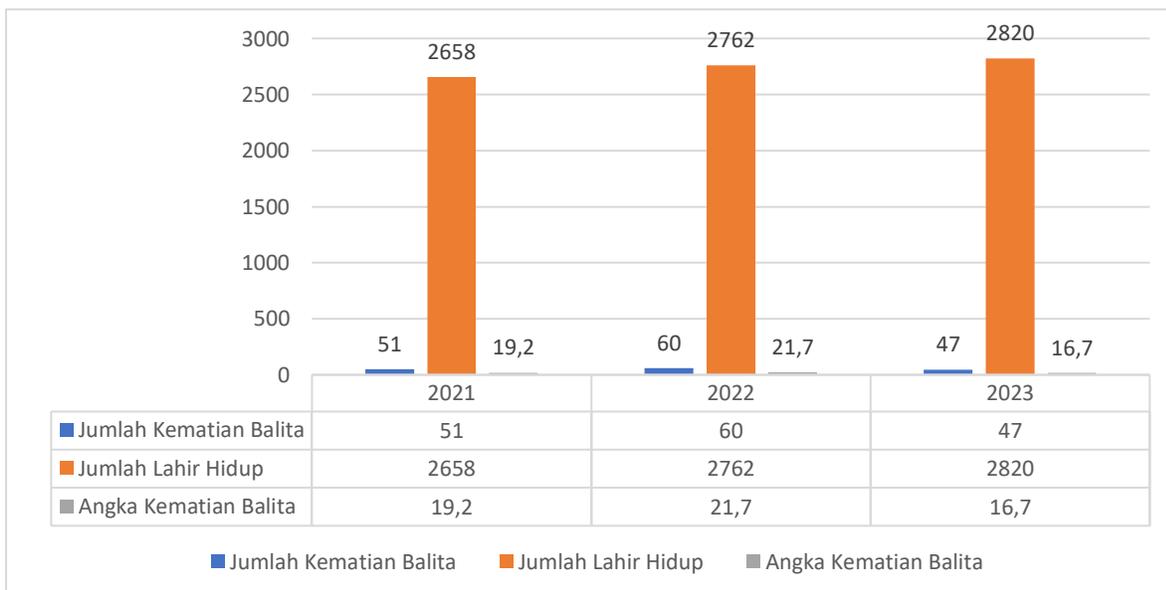
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian bayi tetapi tidak mudah menemukan faktor yang paling dominan. Sebagianan keselamatan persalinan dan faktor pendukung lainnya. Besar faktor penyebab kematian bayi yaitu sebelum usia 1 bulan (masa neonatal yaitu pada usia 0 – 28 hari), kematian bayi tersebut terjadi pada bulan pertama kehidupan diantaranya berada pada minggu pertama kehidupannya. Penyebab kematian pada masa neonatal pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu selama hamil, kesehatan janin selama didalam kandungan seperti asfiksia, premature, kelainan bawaan, dan lain-lainnya, sedangkan penyebab kematian pada usia 28 – 11 bulan disebabkan pneumonia, kelainan saluran cerna dan penyebab kematian lainnya.



2.4.2.2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (≤ 60 bulan) pada periode waktu tertentu per 1.000 Kelahiran Hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sebagaimana pada Angka Kematian Bayi (AKB), kematian balita juga merupakan salah satu indikator penentu derajat kesehatan. Angka Kematian Balita (usia 0 –59 bulan) di Kabupaten Bulungan tahun 2023 sebesar 16,70 per 1000 kelahiran hidup.

AKABA tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. AKABA Tahun 2022 mencapai 21,7. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan telah optimal dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menurunkan angka kematian ini, banyaknya usaha yang telah dikerahkan salah satunya dengan pemerataan pelayanan kesehatan dengan merekrut tenaga kesehatan yang berkompentensi, maupun meratakan dan menambah fasilitas penunjang baik sarana dan prasana kesehatan di puskesmas, pustu, posyandu, maupun fasilitas lainnya serta selalu mengoptimalkan Manajemen Terpadu pada anak (0 – 59 bulan).



Gambar 2.11 Angka Kematian Balita Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan Tahun 2023

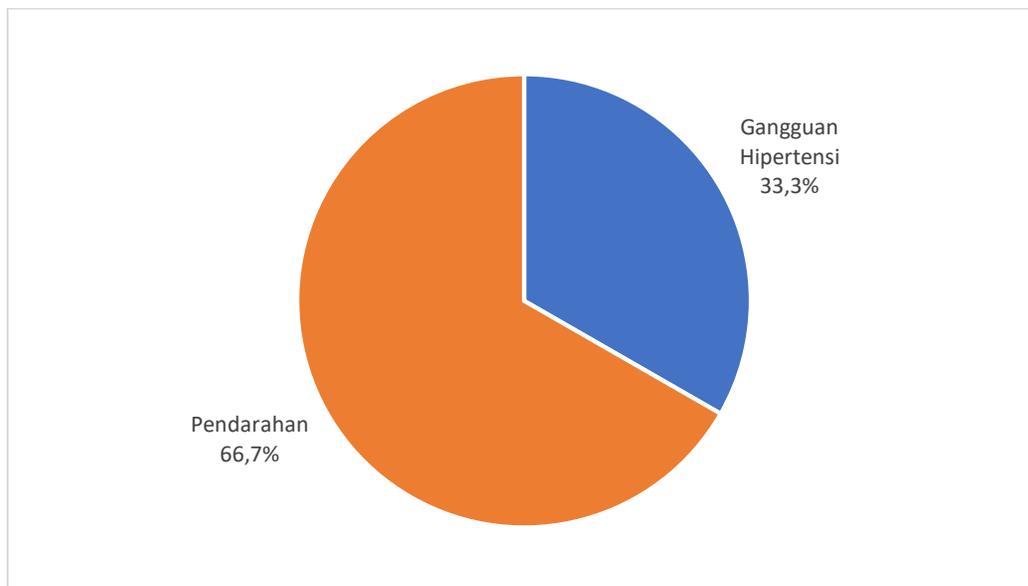


Penyebab kematian Balita atau anak usia 0 – 59 bulan (bayi dan anak balita) merupakan masa sangat rentan terhadap berbagai penyakit karena daya tahan tubuhnya yang masih lemah sehingga mudah tertular penyakit, khususnya penyakit pernafasan dan saluran cerna.

2.4.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Jumlah kematian ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Indikator untuk mengetahui besaran masalah kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan tahun 2023 adalah 106,38 /100.000 Kelahiran Hidup dengan 3 kematian. Angka kematian ibu mengalami penurunan daripada tahun 2022 yang sebesar 217 per 1000.000 kelahiran hidup, dengan kasus kematian mencapai 6 kasus.

Jika melihat dari usia kematian Ibu di Kabupaten Bulungan terdapat tiga kasus. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulungan tahun 2023 disebabkan karena perdarahan 2 kasus, gangguan hipertensi 1 kasus. Jika dilihat dari waktu kematiannya sebanyak 1 orang terjadi pada ibu hamil, dan 2 orang pada kematian ibu nifas.



Gambar 2.12 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan Tahun 2023



Banyak strategi ataupun upaya yang akan terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dari akses, mutu layanan kesehatan ibu, membangun kemitraan yang efektif melalui kerja sama lintas program dan lintas, dan tak kalah pentingnya adalah mendorong dan menggerakkan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bulungan adalah dengan harapan langkah tersebut dapat meningkatkan jangkauan program K4 Ibu hamil, semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, dan di fasilitas kesehatan. Banyak upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan beserta jejaringnya seperti; puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, dan lintas sektor (camat, desa, tokoh masyarakat dan kader), untuk menurunkan kematian ibu antara lain melalui pemerataan melalui penempatan bidan di desa, membentuk kelas Ibu hamil, kegiatan Promosi Gizi Seimbang, Penyuluhan Ibu hamil Resiko Tinggi Usia <20 tahun dan KB Pasca Persalinan, Kegiatan AMP (Audit Maternal Perinatal), penyediaan rumah tunggu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta penyediaan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Perawatan dan pelayanan obstetri Neonatal Emergensi Dasar di puskesmas serta melalui program Jampersal (jaminan persalinan).

2.4.2.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per seribu pada tahun 2023 sebesar 1:2.153, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang berarti satu Fasilitas kesehatan melayani 2.153 penduduk. Beberapa tahun terakhir ini ketersediaan fasilitas kesehatan ini semakin sedikit, dimana disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi sementara jumlah fakses tidak mengalami penambahan kuantitas.



Tabel 2.34 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Puskesmas	18	12	12	12
2.	Jumlah Poliklinik	3	5	5	5
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	54	60	60	60
4.	Jumlah 1-3	75	77	77	77
5.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844	165.775
6.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu	1.816,05	1.814,71	1.972	2.153
7.	Jumlah Kecamatan	10	10	10	10
8.	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1,8	1,2	1,2	1,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 dan diolah (2024)

2.4.2.5. Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosa serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara Kuantitas, pada tahun 2023 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Hal ini menyebabkan angka ketersediaan rumah sakit semakin buruk karena jumlah penduduk tiap tahunnya selalu mengalami penambahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023.

Tabel 2.35 Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1
2.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844	165.775
3.	Rasio Rumah Sakit	1: 136.204	1: 139.733	1:151.844	1:165.775

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan masih belum memadai, dilihat dari Rasio Rumah sakit, satu Rumah sakit di Kabupaten Bulungan harus melayani Seluruh penduduk di Kabupaten Bulungan, 1:165.775 penduduk. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulungan tidak maksimal karena kurangnya ketersediaan rumah sakit yang memadai.

2.4.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu. idealnya satu orang dokter melayani 2500 penduduk.

Tabel 2.36 Rasio Dokter Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Dokter	65	82	86
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844	165.775
3.	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	0,46	0,54	0,52
4.	Rasio Dokter terhadap penduduk	1:2.149,73	1:1.851,75	1: 1.927,62

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2023 sebesar 0,52 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,54 tahun 2022 yang berarti pada tahun 2023 satu dokter melayani 1.928 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Bulungan belum cukup memadai untuk melayani kesehatan masyarakat.

2.4.2.7. Rasio Tenaga medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per seribu penduduk pada tahun 2023 sebesar 5,39 yang berarti pada tahun 2023 satu tenaga medis melayani 185 penduduk. Berikut dibawah ini tabel rasio tenaga media per satuan penduduk.



Tabel 2.37 Rasio Tenaga medis Per satuan penduduk di Kabupaten Bulungan
Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1.	Jumlah Perawat	512
2.	Jumlah Bidan	280
3.	Jumlah Farmasi	73
4.	Ahli Gizi	29
5	Jumlah Semua Tenaga Medis	882
6	Jumlah Penduduk	165.775
7	Rasio Tenaga Medis Per 1000	5,39
8	Rasio Tenaga Medis terhadap Penduduk	1:185,43

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

2.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan dasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. seperti Kondisi jalan, rasio tempat beribadah, luas RTH publik, Rasio Bangunann Ber-IMB, dan Ketaatan Terhadap RTRW.

2.4.3.1. Kondisi Jalan

Ketersediaan Infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan Jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, tahun 2023 di kabupaten Bulungan secara akumulasi telah terbangun jalan 454,89 km.

Tabel 2.38 Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2019-2023

Kondisi Jalan (Km)	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	235,71	248,19	256,08	161,24	181,44
Sedang	102,13	103,86	97,02	30,15	29,69
Rusak	127,04	117,41	116,36	26,41	22,43
Rusak Berat	47,79	43,2	43,2	237,1	221,33
Jumlah	512,67	512,67	512,67	454,89	454,89

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



2.4.3.2. Rasio Tempat Beribadah Per Satuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.39 Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2022

No.	Uraian	2021	2022
1.	Jumlah Tempat Beribadah	428	504
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844
3.	Rasio Tempat Beribadah per 1.000 penduduk	3,06	3,31
4.	Rasio Tempat Beribadah terhadap penduduk	1:326	1:301

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah per seribu penduduk pada tahun 2022 sebesar 3,31 yang berarti pada tahun 2022 satu tempat beribadah bisa menampung 301 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tempat beribadah di Kabupaten Bulungan cukup memadai.

2.4.3.3. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur; dan
- didominasi komunitas tumbuhan



2.5. Evaluasi Hasil Capaian RPJPD Periode Sebelumnya

2.5.1. Kesimpulan Capaian RPJPD Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan 2005-2025, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut,

1. Evaluasi belum dilakukan secara penuh hingga akhir tahun rencana RPJPD namun hingga tahun terkini atau hingga akhir tahun 2022, namun dari hasil evaluasi ini dan dengan melihat kecenderungan pertumbuhan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan, maka sudah dapat memberikan gambaran secara umum terkait dengan capaian pembangunan jangka panjang daerah khususnya untuk 3 (tiga) periode jangka menengah sebelumnya maupun periode jangka menengah terakhir
2. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa pemenuhan beberapa misi sudah mencapai target, antara lain pemenuhan misi pertama terkait dengan pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian di bidang agroindustri, kemudian misi kedua terkait dengan pengembangan SDM di bidang agroindustri, misi ketiga terkait dengan penyediaan infrastruktur, misi ketujuh penegakan supremasi hukum, dan misi kedelapan terkait dengan peningkatan pelayanan publik
3. Beberapa misi sebagian belum tercapai secara penuh dari target yang ingin dicapai, antara lain terkait misi keempat terkait dengan lingkungan hidup, misi kelima terkait dengan pengembangan sosial budaya, misi keenam terutama dalam hal penurunan tingkat pengangguran, misi kesembilan terkait dengan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa fokus untuk peningkatan kualitas partai politik

2.5.2. Rekomendasi Dari Hasil Evaluasi sebagai masukan bagi RPJPD Kab.Bulungan 2025-2045

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana pembanguna jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan untuk pencapaian setiap misi dan kesimpulan yang dihasilkan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Terkait dengan misi pertama dan misi kedua dalam hal pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian agroindustri, meskipun secara umum dalam tahun



berjalan sudah memenuhi target, namun sektor pertanian yang menjadi sektor basis ekonomi Kabupaten Bulungan tetap perlu dilakukan pengembangan agar target pada tahun berikutnya tetap tercapai dan tetap diupayakan pengembangan, karena sebagai basis ekonomi tentunya akan berdampak pada sektor lainnya terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Beberapa hal yang dapat dikembangkan terkait dukungan terhadap peningkatan perkonomian agroindustri ini antara lain dengan

- intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian yang berbasis kearifan dan potensi lokal untuk meningkatkan produktifitas pertanian
- peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang pertanian dan industri pertanian melalui pelatihan maupun Pendidikan formal melalui Kerjasama dengan institusi Pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan
- meningkatkan agroindustri melalui peningkatan industri pengolahan pertanian dan peningkatan ekspor hasil pertanian ke wilayah lain

Rumusan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan pemenuhan capaian dalam hal perekonomian agroindustri ini khususnya dalam pemenuhan capaian misi pertama dan kedua dalam RPJPD 2005-2025 perlu dilanjutkan dengan pengembangan komponen dan capaian target, mengingat pertanian sebagai sektor perekonomian unggulan Kabupaten Bulungan

2. Terkait dengan misi ketiga, dalam hal peningkatan infrastruktur dasar, perlu dilakukan akselerasi pembanguna infrastruktur jaringan jalan dan jaringan kebutuhan infrastruktur lainnya hingga ke tingkat desa, agar arus perekonomian masyarakat dapat berjalan hingga tingkat desa yang juga menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang menjadi sektor perekonomian unggulan Kabupaten Bulungan, keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten perlu disiasati dengan penjaringan dana melalui pembiayaan kreatif dan juga optimalisasi dukungan sumber dana dari Pemerintah Pusat
3. Posisi Kabupaten Bulungan yang tidak terlalu jauh dengan rencana ibukota baru Negara menjadi tantangan bagi pengembangan infrastruktur, khususnya apabila melihat posisi Kabupaten Bulungan menjadi wilayah pendukung bagi kegiatan di Ibukota baru Negara, oleh karena itu keterhubungan dan penyediaan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan



Kalimantan Timur perlu ditingkatkan, dan ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan capaian dalam naskah RPJPD berikutnya

4. Terkait dengan misi keempat, dalam hal lingkungan hidup, Kabupaten Bulungan perlu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan antara lain kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi, selain itu peningkatan kualitas lingkungan di perkotaan perlu pula didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
5. Terkait dengan misi kelima, dalam hal pengembangan sosial dan budaya di Kabupaten Bulungan, perlu tetap dipertahankan sebagai salah satu misi dalam RPJPD selanjutnya mengingat Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki warisan budaya yang cukup khas dan untuk selanjutnya bukan hanya dilestarikan tapi dapat dikembangkan sebagai potensi wisata yang tentunya akan berdampak pula terhadap pengembangan ekonomi wilayah dari sektor pariwisata. Pelestarian budaya di Kabupaten Bulungan dapat pula dikembangkan melalui integrasi nilai budaya pada Pendidikan formal sebagai muatan lokal pembelajaran.
6. Terkait dengan misi keenam, dalam hal pengembangan kualitas sumberdaya manusia, permasalahan terkait tingkat pengangguran menjadi masalah hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bulungan, oleh karena itu Pemerintah perlu memperkuat misi pembangunan jangka panjang selanjutnya dalam fokus untuk peningkatan ekonomi sektor basis terutama dalam bidang pertanian, industri pertanian, pariwisata, dan juga memanfaatkan secara optimal posisi Kabupaten Bulungan yang tidak terlalu jauh dari rencana ibukota baru negara untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor jasa. Hal-hal ini perlu dipertajam dalam rencana pembangunan jangka panjang berikutnya.
7. Terkait penegakan supremasi hukum, yang menjadi misi ketujuh pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan, tentunya Pemerintah perlu terus memperkuat dalam hal pemenuhan aspek legal baik dalam penyusunan peraturan yang diperlukan dan juga penegakan peraturan yang telah ada, baik secara internal di aparaturnya maupun di masyarakat



8. Terkait dengan misi peningkatan pelayanan publik, meskipun secara umum dari indikator tata Kelola pemerintahan sudah memenuhi target capaian kinerja, namun seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Bulungan dan juga tren perkembangan pelayanan pemerintahan terkini, maka dalam rencana pembangunan jangka panjang berikutnya tetap perlu diperkuat dengan inovasi-inovasi dalam capaiannya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bulungan
9. Terkait misi kesembilan, terkait dengan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam tindak lanjut rencana pembangunan jangka panjang berikutnya, pemerintah Kabupaten Bulungan perlu memperkuat edukasi terhadap masyarakat terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga pemahaman terhadap politik baik melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan non-formal.
10. Dari beberapa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang dirumuskan diatas, untuk periode rencana pembangunan jangka panjang selanjutnya, selain fokus dalam pengembangan misi sebelumnya, perlu dikembangkan beberapa hal yang antara lain terkait dengan :
 - Bidang Pendidikan, baik formal maupun non formal, dalam hal peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bulungan
 - Bidang Infrastruktur, kaitannya dengan pemerataan penyediaan infrastruktur keseluruhan wilayah baik secara kuantitas maupun kualitas
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup, baik dengan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup maupun dengan upaya penurunan kejadian bencana karhutla
 - Dalam hal pengembangan perekonomian, fokus dalam pengembangan sektor basis ekonomi
 - Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu potensi basis ekonomi melalui pengembangan ekowisata
 - Pengembangan desa yang lebih partisipatif dan berdaya, baik dalam hal peningkatan kualitas SDM maupun perekonomian desa



2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik

2.6.1. Asumsi Dasar

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat kita ketahui berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu sendiri, maka dari itu diperlukan suatu proyeksi penduduk yang memberikan informasi mengenai penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi yang berdasarkan laju pertumbuhan penduduk belum dapat dilakukan karena hanya mencerminkan total penduduk saja. Metode-metode proyeksi penduduk antara lain, metode matematik, metode komponen dan metode campuran. Metode matematik biasa digunakan untuk menghitung proyeksi total penduduk suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan komponen demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (UN, 1952), namun demikian hasil yang diperoleh metode matematik khususnya di Indonesia, lebih akurat dibanding metode komponen (Karyana, 2002). Menurut BPS bila proyeksi penduduk dihitung untuk jangka waktu yang pendek atau kurang dari 5 tahun baik dengan metode matematik maupun komponen akan didapat hasil jumlah penduduk yang hampir tidak ada perbedaan. Hasil proyeksi metode matematik relatif masih cukup baik jika jangka waktu yang diproyeksikan pendek, ini disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi tidak berubah secara signifikan.

Salah satu metode matematis untuk perhitungan proyeksi penduduk adalah menggunakan Model Linear. Model linear menurut Klosterman (1990) adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model trend. Model ini menggunakan persamaan derajat pertama (first degree equation). Berdasarkan hal tersebut, penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu. Hasil proyeksi akan berbentuk suatu garis lurus. Model ini berasumsi bahwa penduduk akan bertambah/berkurang sebesar jumlah absolute yang sama/tetap (β) pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Ini berarti bahwa, jika P_{t+1} dan P_t adalah jumlah populasi dalam tahun yang berurutan, $P_{t+1} - P_t$ yang adalah perbedaan pertama yang selalu tetap (konstan). Klosterman (1990), mengacu pada Pittengar (1976), mengemukakan bahwa model ini hanya digunakan jika data yang tersedia relatif terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan model lain. Selanjutnya, Isserman (1977) mengemukakan bahwa model ini hanya dapat diaplikasikan untuk wilayah kecil dengan pertumbuhan yang lambat, dan tidak tepat untuk proyeksi pada wilayah-wilayah yang lebih luas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.



2.6.2. Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang

Berdasarkan data eksisting demografi Kabupaten Bulungan secara time series pada tahun sebelumnya, maka dilakukan proyeksi penduduk untuk 20 tahun kedepan berdasarkan angka rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan sebagai berikut

Tabel 2.40 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Tahun Dasar 2023	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Bunyu	11.972	12.463	13.780	15.237	16.848	18.629
Peso	4.479	4.663	5.156	5.701	6.303	6.969
Peso Hilir	4.168	4.339	4.798	5.305	5.865	6.485
Sekatak	10.899	11.346	12.545	13.871	15.338	16.959
Tanjung Palas	17.884	18.617	20.585	22.761	25.167	27.828
Tanjung Palas Barat	6.502	6.769	7.484	8.275	9.150	10.117
Tanjung Palas Tengah	12.261	12.764	14.113	15.605	17.254	19.078
Tanjung Palas Timur	19.512	20.312	22.459	24.833	27.458	30.361
Tanjung Palas Utara	10.744	11.185	12.367	13.674	15.120	16.718
Tanjung Selor	59.172	61.599	68.110	75.310	83.270	92.072
Total Kab. Bulungan	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024, Hasil Analisis 2024



Gambar 2.13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 2025-2045

Sumber : Hasil Analisis, 2024



2.6.3. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi pada transisi demografi tahap kedua. Perhitungan bonus demografi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu negara atau daerah telah mengalami bonus demografi atau belum. Di era otonomi daerah sekarang ini, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan wajib daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan daerah mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersebut kemudian dituangkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK. Lebih jauh, kebijakan daerah yang dituangkan dalam GDPK tersebut diformulasikan berdasarkan perhitungan bonus demografi. Dalam perhitungan bonus demografi dikenal 2 model yaitu rasio ketergantungan (dependency ratio) dan ekonomi daur hidup (economic lifetime)(Kabul & Haliliah, 2019). Selanjutnya, Kabul & Haliliah (2019) menyatakan bahwa model rasio ketergantungan meliputi 4 metode, yaitu metode Cheung et al., (2004); metode Adioetomo (2012); metode Komine & Kabe (2009); dan metode Golini (2014). Sedangkan model ekonomi daur hidup meliputi 2 metode yakni rasio dukungan (support ratio) dan metode rasio daur hidup kesejahteraan pensiun terhadap total pendapatan tenaga kerja (Mason et al., 2017).

Dalam model rasio ketergantungan (dependency ratio) dimana bonus demografi dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia tidak produktif yang dimaksud adalah penduduk muda (0-14 tahun) dan penduduk tua atau lanjut usia (≥ 65 tahun), sementara penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bulungan sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut,

Tabel 2.41 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulungan 2025-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Usia 0-14 tahun	24,62	24,50	24,10	23,78	22,21	21,24
Usia 15-64 tahun (produktif)	68,26	67,78	66,99	66,10	67,20	67,51
Usia > 65 tahun	7,12	7,72	8,91	10,12	10,59	11,25
Rasio Ketergantungan	46,50	47,54	49,28	51,29	48,81	48,13

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024



2.6.4. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, selanjutnya proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun kedepan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan disampaikan pada tabel-tabel berikut,

Tabel 2.42 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	37.168	38.693	42.783	47.305	52.305	57.834

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.43 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air MInum

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/h)	1.313	1.367	1.512	1.671	1.848	2.043

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.44 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Jumlah Rumah	37.168	38.693	42.783	47.305	52.305	57.834
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	48.319	50.300	55.617	61.496	67.997	75.184

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024



Tabel 2.45 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan berdasarkan Jumlah Produksinya

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Produksi Sampah (ton/thn)	118	123	136	150	166	184

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.46 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Rumah Sakit (tempat tidur)	158	164	181	201	222	245
Puskesmas (Unit)	8	8	9	10	11	12

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.47 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
TK	126	131	145	160	177	196
SD/MI	98	103	113	125	139	153
SMP/MTs	33	34	38	42	46	51
SMA/SMK/MA	33	34	38	42	46	51

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 disampaikan beberapa kebijakan dalam pengembangan wilayah daerah Kabupaten Bulungan, yang antara lain terdiri dari:

- a. pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan



dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;

- c. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing; dan
- d. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan kebijakan pengembangan daerah yang ditetapkan di atas, maka selanjutnya ditetapkan strategi penataan ruang wilayah untuk masing-masing kebijakan pengembangan daerah.

Strategi untuk pengembangan daerah pertama adalah diarahkan untuk pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Strategi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 untuk pengembangan pusat pemerintahan yang modern Kabupaten Bulungan antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan Kawasan pusat pemerintahan yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjang pelayanan administrasi yang terpadu dan terintegrasi;
- b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
- c. mengembangkan pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah, terdiri atas:

- a. membangun dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di perkotaan dan di luar perkotaan di daerah demi pemerataan sumber penghidupan ekonomi penduduk;
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan industri sebagai fasilitas pengelolaan hasil produksi sumber daya alam hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;



- c. meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi;
- d. membangun Kawasan Agropolitan pada Kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antarwilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik;
- e. memfasilitasi pengembangan *food estate* sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional; dan
- f. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor pertambangan guna mengolah komoditas daerah

Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing, terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas jaringan yang menghubungkan ibu kota daerah dengan seluruh wilayah kecamatan;
- b. meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
- c. meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat;
- d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan Strategis dan sentra produksi;
- e. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;
- f. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan *food estate* serta infrastruktur sumber daya air lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan dan perlindungan terhadap daya rusak air;
- g. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra produksi perikanan; dan
- h. mengembangkan jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana pendukung permukiman secara merata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kegiatan penduduk.



Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan hutan budi daya;
- b. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan sebagai kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan;
- c. memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat di daerah;
- d. melestarikan dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove;
- e. merencanakan dan mengembangkan kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari RTH;
- f. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. menjaga keberadaan pertanian pangan;
- h. melindungi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas;
- i. merevitalisasi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi;
- j. mengembangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari;
- k. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
- l. mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- m. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
- n. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata; dan
- o. mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata



Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulungan dibagi atas sistem pusat kegiatan atau sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

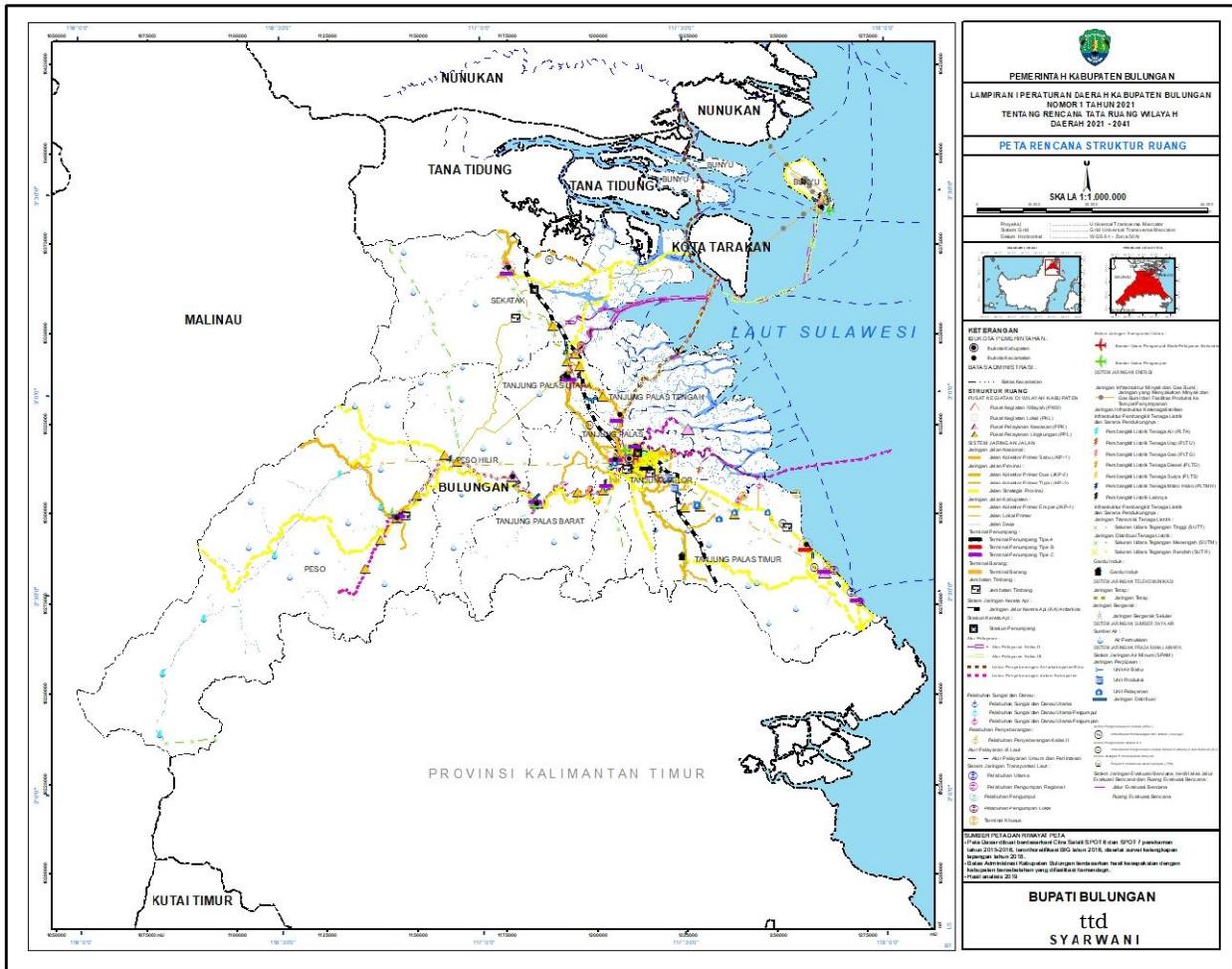
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) :
 - PKW Perkotaan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), terdiri dari :
 - PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PKL Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu;
 - PKL Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 - PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari :
 - PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPK Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPK Tanjung Palas Hilir di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri dari :
 - PPL Long Buang di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Lian di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Peso di Kecamatan Peso;
 - PPL Lepak Aru di Kecamatan Peso;
 - PPL Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPL Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor;
 - PPL Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;



**BAPPEDA & LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN**



- PPL Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- PPL Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- PPL Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- PPL Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak; dan
- PPL Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu



Gambar 2.14 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041



Terkait dengan arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.

Untuk Kawasan lindung terdiri dari :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, seluas kurang lebih 212.755 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas :

- Kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 206.961 (dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat
- Kawasan Lindung Gambut, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
- Kawasan resapan air, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Sekatak

b. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat, seluas kurang lebih 33.721 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, terdiri atas :

- Sempadan Pantai, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Sempadan Sungai, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai yang tersebar pada Kawasan Perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah
- Kawasan sekitar danau atau waduk, terdapat di Kecamatan Peso dan Kecamatan Bunyu

c. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi ditetapkan seluas kurang lebih 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan cagar alam geologi, terdiri dari : Kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan Kawasan keunikan bentang alam,



terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, berupa sempadan mata air, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso

d. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana, seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar terdiri dari:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau longsor, di Kecamatan Sekatak;
- Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Peso Hilir; dan
- Kawasan rawan tsunami dan/atau abrasi, di sepanjang Kawasan pesisir Kabupaten Bulungan

e. Kawasan ekosistem *mangrove*.

Kawasan ekosistem *mangrove* ditetapkan seluas kurang lebih 14.102 (empat belas ribu seratus dua) hektar terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Sedangkan untuk Kawasan budi daya, ditetapkan 9 (Sembilan) tipologi kawasan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan, antara lain:

a. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 adalah seluas kurang lebih 742.769 hektar, terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas;
Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 461.196 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur



- Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan hutan produksi tetap, seluas kurang lebih 275.976 hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Bunyu
 - Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, seluas kurang lebih 5.597 (lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak
- b. Kawasan perkebunan rakyat
Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Selor
- c. Kawasan pertanian
Kawasan pertanian seluas kurang lebih 244.856 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar, terdiri atas:
- Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu
 - Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas
 - Kawasan perkebunan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu



d. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan, seluas kurang lebih 40.361 (empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar, terdiri atas:

- Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - (1) tempat pelelangan ikan, terdiri atas:
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor;
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu; dan
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
 - (2) sarana dan prasarana perikanan, terdiri atas:
 - Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu;
 - Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor;
 - *cold storage* di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- Kawasan perikanan budi daya, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas.

Kawasan perikanan budi daya lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan

e. Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 10.655 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas:

- Kawasan pertambangan mineral, berupa pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bunyu
- Kawasan pertambangan batubara, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Selor
- Kawasan peruntukan pertambangan batuan, tersebar di seluruh Kecamatan
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat di Kecamatan Bunyu



f. Kawasan industri

Kawasan industri, seluas kurang lebih 11.549 (sebelas ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:

- Kawasan industri, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor
- sentra industri kecil dan menengah, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Sentra industri kecil dan menengah dan industri kecil menengah lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal

g. Kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:

- Kawasan pariwisata alam, terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata pantai, di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu; dan
 - (2) Kawasan Kawasan wisata sungai, pada:
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso;
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir;
 - Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak;
 - Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir;
 - Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso
- Kawasan pariwisata budaya, terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas;



- (2) Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor;
- (3) Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas;
- (4) Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas;
- (5) Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- (6) Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- (7) Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- (8) Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- (9) Kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso;
- (10) Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
- (11) Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas

h. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman, seluas kurang lebih 35.246 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan permukiman perkotaan, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
- Kawasan permukiman perdesaan, tersebar di seluruh kecamatan

i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

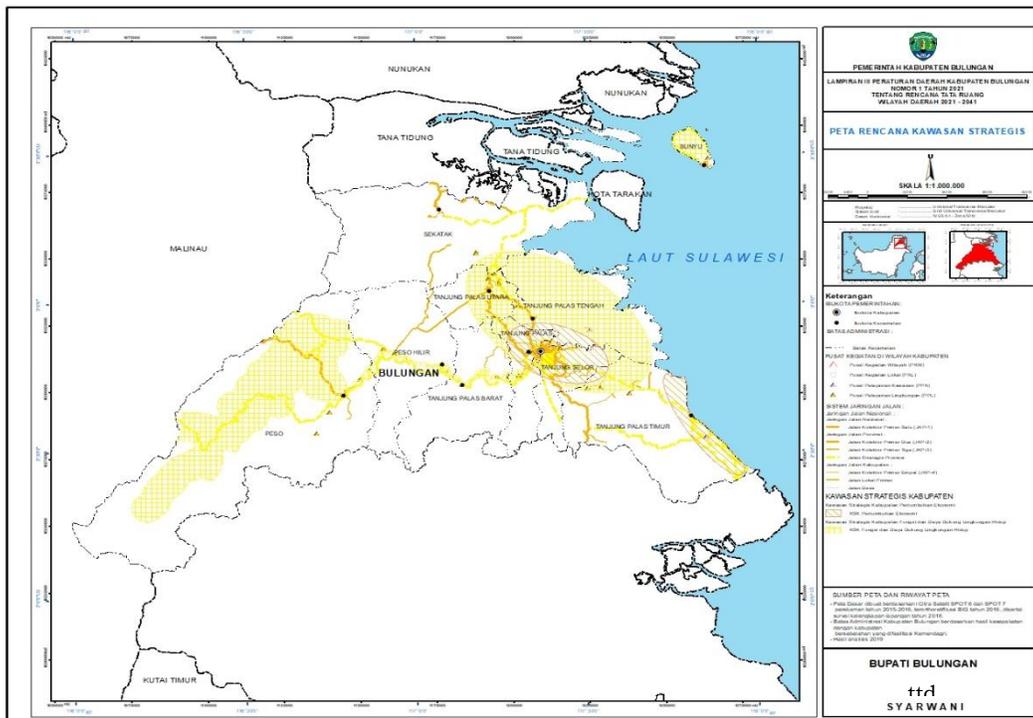
Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas kurang lebih 31 hektar antara lain terdiri dari :

- Kawasan Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BC Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Markas Brigadir Infantri (MABRIGIF) 24/ Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;



Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan kawasan strategis pada wilayah daerah kabupaten, terdiri dari :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
 - Kawasan pertanian tanaman pangan terpadu *food estate and rice estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas;
 - Kawasan Perkotaan Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - Kawasan Perkotaan Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa:
 - Kawasan hulu Sungai Kayan pada Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA) Peso dan Kawasan Delta Kayan sebagai satu kesatuan hulu hilir untuk konservasi sumber daya air dan ekosistem; dan
 - Kawasan sekitar Hutan Lindung Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu.



Gambar 2.16 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Permasalahan Perekonomian

Pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Bulungan masih menghadapi kendala isolasi wilayah. Adanya beberapa wilayah yang terisolir (dari prasarana perhubungan darat) menyebabkan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terhambat. Pengembangan ekonomi wilayah selain membuka isolasi wilayah juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pemilihan komoditi harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kondisi sosial kultural masyarakat, dan tentunya peluang pasar. Pengembangan produksi pangan secara umum perlu dilakukan di semua wilayah kecamatan, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan untuk daerah yang potensial untuk pengembangan produksi pangan dalam skala besar perlu didorong menjadi lumbung pangan untuk mewujudkan *rice food estate* di Kabupaten Bulungan.

3.1.2. Permasalahan Sosial dan SDM

Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan daerah dalam memajukan kemampuan dan daya saing masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah, maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.

Selain itu Kabupaten Bulungan memiliki tugas berat dan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih



kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budi daya.

3.1.3. Permasalahan Lingkungan

Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha, kerusakan hutan *mangrove* dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.

3.1.4. Permasalahan Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian, pendanaan yang terbatas merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.

3.1.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan indikator pembangunan yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Indikator yang digunakan dapat berupa SPM (standar pelayanan minimal), SPP (standar pelayanan prima), dan IDI (indeks demokrasi Indonesia). Implementasi pelayanan tersebut dapat dipublikasikan oleh setiap OPD kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk POS (prosedur operasional standar).

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Global

Dewasa ini, semua negara di dunia menghadapi tantangan dan dinamika global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Hal ini merupakan sebuah transformasi dalam skala besar dalam jangka waktu yang panjang yang bersifat massif karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan system informasi global. Setidaknya terdapat sepuluh tren global yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang 2045. Tren global ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang dapat diartikan dari suatu sisi sebagai peluang dan potensi dalam mendorong pengembangan



ekonomi. Namun disisi lain dapat menjadi distrupsi ekonomi yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat global.

3.2.1.1. Isu Terkait Pembangunan Berkelanjutan pada SDG's

Dengan berakhirnya agenda pembangunan global Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam agenda pembangunan global yang berkelanjutan tersebut terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menyediakan kesempatan kerja yang penuh, produktif dan layak bagi semua orang.
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
- 11) Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.



- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.2.1.2. Isu Terkait Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi dunia adalah salah satu factor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan social masyarakat global. World Population Prospect (2022) menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 Miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus bertambah namun lajunya terjadi perlambatan.

PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dan 2045 jumlah penduduk dunia mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa. Kondisi ini bisa terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian, penurunan angka kelahiran, terjadi penambahan penduduk usia tua, dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Berkembangnya penggunaan teknologi memberikan dampak mikro terhadap mobilitas dan kualitas struktur keluarga. Penduduk dunia memiliki resiko tidak fenomena tidak memiliki anak, menunda pernikahan dan perilaku menyimpang sesama jenis yang berdampak terjadinya penurunan angka kelahiran. Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan beberapa negara dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

3.2.1.3. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Perkembangan geopolitik dan ekonomi adalah menjadi tantangan bagi semua negara di dunia dewasa ini. Salah satu tantangan geopolitik global yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antara negara adidaya yang makin meluas yang dapat bermunculannya kekuatan baru yang mempengaruhi dan memicu ketegangan di suatu kawasan yang membutuhkan sikap Indonesia dalam hal tersebut.



Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut memberikan dampak terhadap keharmonisan antar bangsa di kawasan lainnya. Seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Persaingan politik seperti di kawasan Indo Pasifik yang makin meluas jelas akan memberikan dampak kepada Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek zona kemaritiman yang diklaim strategis di masa datang. Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai wadah untuk *Outlook of Indo-Pacific* untuk meningkatkan kerjasama yang positif dan mampu meredam munculnya konflik antar Kawasan Selanjutnya belum tuntasnya permasalahan Palestina – Israel sampai hari ini turut menjadikan terganggu dan meluasnya dampak geopolitik yang ditimbulkan. Sampai saat ini, dampak dari konflik Palestina – Israel telah meluas sampai ke kawasan Laut Merah dengan terjadinya blockade kapal yang memiliki Afiliasi dengan Israel.

Aspek geoekonomi terjadi dewasa ini adalah makin mendominasinya negara berkembang terhadap total output ekonomi global. Sektor komoditas tidak menjadi factor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kelembagaan ekonomi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki peluang dan tantangan untuk memberikan peran yang luas dalam perekonomian Kawasan.

Perkembangan sains dan teknologi dewasa ini turut memberikan andil dalam mengeksplorasi pemanfaatan outerspace sebagai sumber perekonomian. Luar angkasa dan udarayang ada merupakan warisan bersama umat manusia yang membutuhkan pengelolaan secara bijak dan dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan outerspace dimasa datang tidak tunduk kepada kepentingan negara tertentu yang telah lebih dahulu menguasai teknologi antariksa. Terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan outerspace yaitu: 1) Ekonomi Outerspace, 2) kelestarian outerspace, dan 3) keamanan outerspace. Pemanfaatan outerspace untuk kebutuhan ekonomi global akan terus meningkat. Dewasa ini outerspace telah dapat menghadirkan informasi yang bersifat real time untuk kebutuhan pembangunan dunia.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dijelaskan terkait dengan isu dan tantangan pembangunan kedepan, khususnya dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan selanjutnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang



sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayah dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan antara lain :

1. Rendahnya tingkat produktifitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Hal ini terlihat dari rata-rata produktifitas Tital Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relative tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi negara maju periode 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019.

2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan berteknologi tinggi, namun peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen Pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 1,28 persen PDB.

3. Kuantitas dan kualitas SDM Peneliti belum memadai

Hal ini tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408)

4. Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian masih rendah

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya terjadi akibat pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktifitas faktor-faktir produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah.



6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan

7. Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian masih relative rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,15 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019

8. Produktifitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

Hal ini terlihat dari tingkat produktifitas sebesar US\$ 7.274,9 per pekerja, dibawah rata-rata Kawasan ASEAN sebesar US\$ 8.449 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktifitas diantaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan SMP kebawah), ketidaksesuaian keahlian antara lulusan Pendidikan dengan pasar ternaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merepon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Hal ini tercermin dari porsi energi fosil untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi

10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau

Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktifitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy). Timbulan limbah B3 tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022.



3.2.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Terkait dengan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, mengacu kepada isu strategis daerah pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dengan visi “Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan”, diidentifikasi beberapa isu strategis antara lain :

1. Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022.

Pengolahan komoditas-komoditas di atas menunjukkan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi sejumlah komoditas yang diunggulkan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus diproduksi jika pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat bertumbuh lebih cepat dan kuat apabila hasil sumber daya alam tidak dijual dalam keadaan mentah atau terbatas sebagai bahan baku yang bernilai tambah rendah. Oleh karena itu, agenda hilirisasi sumber daya alam perlu diakselerasi dan diangkat sebagai salah satu isu strategis Provinsi Kalimantan Utara agar pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang dapat menghasilkan perekonomian yang bernilai tambah tinggi, kuat, dan berkelanjutan.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Biru, dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan



biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.

3. Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar 0,53 persen dari tahun 2015 hingga 2022. Tingkat kemiskinan sempat peningkatan selama masa pandemi Covid 19. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Bulungan. Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan menunjukkan penurunan sebesar 2,72 persen selama tahun 2013 hingga 2022. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata Kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta isu kewilayahan di pulau Kalimantan. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal.



5. Inklusi Sosial dan Kesetaraan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marjinalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

6. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tripple Planetary Criysis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan.

7. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk didalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL, maupun dokumen lingkungan lainnya, yang berhubungan dengan pemberian izin lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya alam, yang memiliki risiko (dampak) terhadap lingkungan perlu untuk semakin diperketat dan ditingkatkan pemanfaatannya. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.



8. Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahalnya biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana transportasi yang belum optimal.

9. Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%.

10. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata Kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan hard border ke soft border. Pendekatan soft border menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan actor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan.

11. Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital

Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal



seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi.

3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil kajian dan perumusan isu pembangunan Kabupaten Bulungan yang mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan yang merupakan hasil dari pengkajian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperoleh kondisi pencapaian dari 220 indikator TPB berdasarkan Metadata I, terdapat 126 atau 57% indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS), 27 atau 12% indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 13 atau 6% indikator yang belum dilaksanakan (BB) dan 54 atau 25% indikator yang tidak ada data (NA).

Dari 27 indikator yang berstatus sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, terdapat 8 indikator yang berpengaruh terhadap kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap upaya tambahan yang akan dilakukan untuk mencapai target nasional.

KLHS RPJPD juga telah merumuskan serangkaian isu strategis dan strategi untuk mencapai target dalam seluruh indikator TPB yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Bulungan Yaitu:

Tabel 3.1 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Isu Strategis dan Strategi RPJPD Kabupaten Bulungan

No.	Isu Strategis	Strategi
1	Hukum dan Tata Kelola	Edukasi dan Penegakan Hukum Secara Adil
2	Jaminan Sosial bagi Masyarakat	Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Jaminan Sosial
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
4	Penanggulangan Bencana	Pengurangan Risiko dan Peningkatan Kemampuan Menghadapi Bencana
5	Pengembangan Ekonomi dan Industri	Peningkatan Kontribusi Pendapatan dari Kegiatan Selain Pertambangan dan Migas
6	Pengembangan Infrastruktur	Penjaminan Kualitas Infrastruktur Dasar
7	Penyediaan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penjaminan Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana



No.	Isu Strategis	Strategi
8	Penyediaan Layanan Pendidikan	Penjaminan Kualitas Layanan Pendidikan
9	Penyiapan Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja	Penjaminan Mutu Sumberdaya Manusia dan Penciptaan Lapangan Kerja
10	Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan	Pemulihan dan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

3.2.5. Isu Strategis Daerah

Pembangunan daerah merupakan proses pembaharuan, berkelanjutan, peningkatan, dan pengembangan dari hasil pembangunan yang telah dicapai periode sebelumnya. Pembangunan ke depan mengalami pergeseran paradigma dimana masyarakat atau manusia selain sebagai obyek juga sekaligus menjadi subyek atau pelaku pembangunan, sebagai motor penggerak pembangunan sedangkan peran pemerintah akan bergeser lebih menjadi fasilitator dan moderator pembangunan. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut di atas dan dengan mengacu pada kondisi obyektif daerah maka titik berat pembangunan nasional dan daerah saat ini sebagaimana dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional lebih bertumpu pada pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai penggerak utama pembangunan, dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam secara terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung.

Keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan yang merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, menggunakan pendekatan kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta melalui mekanisme saling memperkuat. Proses pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan yang telah dilaksanakan di seluruh sektor selama ini, telah memberikan hasil positif dan kemajuan yang sangat signifikan, sehingga keadaan tersebut telah menguatkan posisi Kabupaten Bulungan sebagai pusat pengembangan wilayah bagi daerah hinterland-nya.

Akan tetapi terdapat berbagai kekurangan baik sebagai akibat dari paradigma pembangunan sentralistik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata maupun dampak lain dari proses pembangunan itu sendiri dan bahkan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang hanya dilakukan secara parsial serta keterbatasan sumber daya dan dana.



Pergeseran paradigma pembangunan yang sentralistik menuju desentralistik dewasa ini, berorientasi pada pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan sumberdaya lokal. Paradigma pembangunan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan masa depan baik menghadapi era globalisasi dan informasi maupun dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengelola pembangunan, termasuk antisipasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang mengarah pada pasar bebas (era globalisasi). Pergeseran paradigma pembangunan tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Bulungan untuk lebih mengembangkan inovasi dan kemampuan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Perubahan paradigma pembangunan sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaan dengan segala implikasinya.

Dalam rangka lebih mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih optimal, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan senantiasa memfokuskan perhatian pada optimalisasi pembangunan sesuai potensi yang dimiliki. Upaya ini dilakukan melalui penajaman pilihan program prioritas sesuai potensi ekonomi, situasi dan kondisi yang ada, serta berbagai kebutuhan sebagai kebijakan strategis dalam kurun waktu tertentu sesuai dinamika sosial dan politik. Pilihan prioritas akan merupakan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bulungan serta memuat berbagai kebijakan dengan mengacu pada kebijakan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Bulungan dalam periode jangka panjang terakhir dan juga pada periode jangka menengah yang terakhirpula, berdasarkan data-data statistik daerah, dan berdasarkan pemenuhan aspek kinerja pembangunan daerah, didapat beberapa permasalahan pokok yang sampai saat ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kabupaten Bulungan, beberapa permasalahan yang ada, antara lain :

1. Perlunya dukungan infrastruktur wilayah

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian, pendanaan yang terbatas merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.



2. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan daerah dalam memajukan kemampuan dan daya saing masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah, maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan tentunya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, yang secara berkesinambungan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah yang disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulungan. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini menjadi hambatan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bulungan yang lebih baik bagi semua. Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya GAP antara kinerja pembangunan saat ini dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

3. Meningkatnya kebutuhan energi

Pertumbuhan Kabupaten Bulungan yang juga sebagai ibukota Provinsi meningkat pesat dalam periode pembangunan jangka panjang terakhir. Pertambahan penduduk baik yang terjadi akibat angka kelahiran dan juga migrasi karena adanya data Tarik Kabupaten Bulungan sebagai pusat kegiatan menjadikan pertumbuhan penduduk meningkat pesat yang tentunya berimplikasi pada kebutuhan energi. Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



6,00 MW dengan beban puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini.

4. Angka kemiskinan

Salah satu tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budi daya. Selain itu kualitas SDM Kabupaten Bulungan pun perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing agar peningkatan kualitas SDM secara signifikan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup.

5. Kualitas lingkungan hidup

Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha, kerusakan hutan *mangrove* dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.

6. Penurunan kontribusi sektor pertanian

Salah satu tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan (berdaulat pangan) adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi pertaniannya terutama pada subsektor tanaman pangan. Suatu daerah dikatakan berdaulat pangan tecermin dari kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerahnya. Meskipun secara umum sektor pertanian Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan peran dalam kontribusi ekonomi daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun jika melihat 4 tahun ke belakang, kontribusinya masih fluktuatif, bahkan di tahun 2017 kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan kontribusi pada tahun 2020. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kontribusi sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian, belum optimalnya pengembangan produksi pertanian berbasis potensi lokal, dan masih minimnya fasilitasi pemerintah untuk pengembangan industri hulu - hilir sektor pertanian guna mengolah komoditas tanaman pangan daerah.

Isu-isu strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan merupakan rangkuman dari berbagai potensi dan permasalahan, serta mencerminkan



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

berbagai fenomena yang muncul di wilayah Kabupaten Bulungan, dan juga sebagai penjabaran serta tangkapan perumusan yang secara berkesinambungan merupakan hasil kajian bersama pada penyusunan KLHS, sehingga dapat dirumuskan isu strategis utama dalam perumusan RPJPD Kabupaten Bulungan ini, antara lain :

1. Isu terkait dengan Konversi Lahan

Alih fungsi dan konversi lahan ke peruntukan lainnya merupakan salah satu isu strategis yang berdampak negatif bagi lingkungan. Konversi lahan fungsi lindung ke lahan budidaya (perkebunan, pertambangan, pertanian, permukiman dan lainnya), akan menimbulkan dampak negatif bagi fungsi hidroorologis hutan. Fungsi hidroorologis ini dipengaruhi oleh antara lain oleh jenis vegetasi, tanah, bentangan alam dan iklim. Berubahnya komposisi tutupan vegetasi hutan menyebabkan kerusakan siklus air. Akibatnya di musim penghujan apabila intensitas curah hujan tinggi, akan terjadi banjir dan di musim kemarau ketika intensitas curah hujan yang sangat rendah, akan terjadi kekeringan. Erosi dan sedimentasi terjadi sebagai akibat perubahan tutupan lahan di kawasan hulu sungai dan sempadan sungai. Ketersediaan air tanah juga turut terpengaruh akibat terganggunya keseimbangan fungsi ekologis hutan. Kondisi demikian banyak terjadi di Kabupaten Bulungan seiring dengan perkembangannya.

2. Isu terkait meningkatnya tekanan pada wilayah DAS

Kabupaten Bulungan dilintasi DAS Kayan yang merupakan Wilayah Straregis Nasional. Kondisi kedua DAS tersebut saat ini mulai terjadi pendangkalan serta banyak terjadi kegiatan budidaya disepanjang DAS tersebut. Jika kondisi wilayah tangkapan airnya tidak diperhatikan dan budidaya yang terdapat disepanjang DAS tersebut tidak dikendalikan maka kualitas air akan terus menurun. Namun di sisi lain, DAS Kayan yang melintasi Kabupaten BUungan dapat menjadi potensi bagi peningkatan perekonomian BUlungan, oleh karena itu konsep pengembangannya tetap mempertimbangkan potensi ekonomi dalam pengembangannya, namun tetap memperhatikan dan berpegang kepada aturan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

3. Isu terkait dengan Peningkatan Perekonomian melalui Sektor Pertanian sebagai salah satu Sektor Basis Ekonomi dan pengembangan sektor basis lainnya

Dari ekonomi sektor basis terutama dalam bidang pertanian, industri pertanian, pariwisata, dan juga memanfaatkan secara optimal posisi Kabupaten Bulungan yang tidak terlalu jauh dari rencana ibukota baru negara untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor jasa.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



4. Isu terkait Pembangunan Berkelanjutan

Daya dukung sumberdaya alam yang terbatas yang menjadi modal dasar dalam pengembangan perekonomian, tentunya harus terjamin keberadaannya bukan hanya pada konteks rencana pembangunan dalam tahapan formal namun pembangunan sepanjang masa. Permasalahan dalam lanjutan pembangunan seringkali terjadi karena adanya keterbatasan dalam sumberdaya yang dapat diolah, oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek perlu dikedepankan dalam melakukan perumusan rencana pembangunan khususnya dalam jangka 20 tahun sebagai perwujudan RPJP Kabupaten Bulungan pada tahapan selanjutnya.

5. Isu terkait dengan pelayanan dasar

Pelayanan kesehatan, pelayanan Pendidikan, pelayanan terkait dengan sanitasi lingkungan, air bersih, serta penyediaan energi menjadi isu penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana penyelesaian isu permasalahan dalam pelayanan dasar ini dapat menjadi penopang penting dalam mewujudkan kemandirian Kabupaten Bulungan dengan SDM yang unggul.

6. Isu terkait dengan Pengembangan SDM

Permasalahan terkait sumber daya manusia (SDM), khususnya tingkat pengangguran, menjadi isu utama di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat misi pembangunan jangka panjang dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM. Pengembangan kualitas SDM ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal yang ada di Kabupaten Bulungan

7. Isu terkait dengan peningkatan Infrastruktur

Berdasarkan hasil kajian pada penyusunan KLHS yang dilakukan secara simpultan, isu terkait lingkungan baik kaitannya dengan risiko kebencanaan faktor alam maupun yang terjadi karena kegiatan manusia menjadi isu permasalahan yang strategis. Penanganan dan pemanfaatan lahan paska kegiatan tambang, penggalian potensi kelautan, pesisir, dan perkebunan juga menjadi isu penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan

8. Isu terkait dengan peningkatan Infrastruktur

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Kabupaten Bulungan seharusnya memiliki infrastruktur yang handal dan unggul dalam melayani kebutuhan bukan hanya skala Kabupaten tapi juga skala Provinsi, serta mampu mendukung kebutuhan pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

dalam skala regional hingga negara tetangga karena posisi Provinsi Kalimantan Utara yang berada berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satu permasalahan Kabupaten Bulungan adalah kurang handalnya simpul inlet/outlet wilayah dan sehingga masih bergantung kepada wilayah sekitar seperti Tarakan maupun Balikpapan, sebagai ibukota Provinsi sudah seharusnya Bulungan memiliki simpul inlet/outlet yang dapat mengakses langsung pergerakan secara nasional maupun internasional. Selain itu kondisi infrastruktur wilayah sebagai ibukota Provinsi dirasa masih kurang, dengan kondisi infrastruktur yang masih belum melayani kebutuhan seluruh masyarakat, kualitas yang masih kurang handal, serta rentan terhadap risiko bencana

9. Isu terkait dengan Transformasi Digital

Transformasi Digital menjadi tren terkini dalam pengelolaan Pemerintahan khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Transformasi digital bukan hanya sekedar upaya dalam meningkatkan pelayanan tapi juga sebagai salah satu langkah dalam melakukan akselerasi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Bulungan.



IV | VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045

Dalam mewujudkan suatu visi wilayah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama faktor-faktor yang dapat diperkirakan (predictable), baik faktor-faktor dari dalam wilayah (internal) seperti potensi wilayah, budaya lokal, kondisi sosial kemasyarakatan, serta kelemahan dan kendala yang dihadapi faktor-faktor dari luar (eksternal) seperti misalnya gejala perubahan global, perdagangan bebas, arus migrasi, dan kondisi sosial politik dan keamanan regional maupun nasional.

Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman daerah serta peluang dan tantangan masa depan, maka seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan memiliki pandangan jauh kedepan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berdasarkan kondisi daerah saat ini, dan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan, maka dipilihlah visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Bulungan 2025-2045 , yaitu :

“KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN DENGAN SDM YANG MANDIRI, DAN BERDAYA SAING“

Visi dimaksud mengandung makna adanya harapan yang hendak dicapai oleh segenap masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian terutama terutama dalam membangun Kabupaten Bulungan menjadi salah satu wilayah Kabupaten yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara yang Unggul serta didukung oleh Sumber Manusia yang unggul dan berkualitas ditandai dengan memiliki daya saing, dan dalam konsep pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan



Makna Visi tersebut adalah :

Maju, dalam hal ini pembangunan Kabupaten Bulungan menekankan pada faktor utama yang paling berdampak buat maju dan berkembangnya suatu daerah adalah apabila daerah tersebut memiliki aset yang berharga. Aset berharga maksudnya kekayaan alam berupa Pertanian, Nelayan, Pariwisata, tambang dll yang dimiliki daerah tersebut. Suatu daerah agar bisa maju jelas memiliki kekayaan alam yang dapat dikelola oleh pemerintahnya. Tanpa memiliki kekayaan alam sangat sulit bagi daerah tersebut untuk membuatnya lebih maju. Apabila kekayaan alamnya tersedia, tentu membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berkerja dan mengolah sumberdaya alamnya dengan baik. Sehingga dengan adanya pengelolaan kekayaan alam tadi yang dilakukan dengan baik dan benar akan membantu pencapaian target pendapatan daerah tersebut. Jadi, Semakin banyak kekayaan alam suatu daerah maka harapan untuk majunya daerah tersebut semakin besar pula.

Berkelanjutan pada Visi diatas menekankan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan dimana Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Pada proses pelaksanaannya Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumberdaya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidak absolut (mutlak) tetapi merupakan batas yang luwes (flexible) yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pembangunan yang berkelanjutan tentunya menjadi salah satu pendekatan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bulungan, sumberdaya yang ada saat ini dapat diolah dan masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk meningkatkan basis ekonomi Kabupaten Bulungan melalui potensi sumberdaya yang ada, namun suatu saat daya dukung sumberdaya ini akan habis apabila tidak dikelola dengan bijak dengan mengedepankan konsep berkelanjutan, pembangunan memang akan dilakukan secara bertahap namun konsep utamanya adalah sumber daya yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan selamanya dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan, berorientasi pada kualitas, dan optimalisasi sumber daya alam yang terbarukan.

Mandiri bermakna Kabupaten Bulungan yang mandiri adalah SDM Kabupaten Bulungan yang dapat secara optimal memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk kepentingan dan kebutuhan Pembangunan dan masyarakatnya, dengan kemandirian yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan diharapkan dapat menjadikan masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun keunggulan juga dikembangkan dengan konsep kemandirian, harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci mencapai keunggulan sekaligus kemandirian. Secara mendasar keunggulan dari kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap masyarakat atau daerah mengenai dirinya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan dan berani untuk menjadi yang terdepan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap mengedepankan kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban.

Dari sisi lainnya, dalam konteks Pembangunan wilayah, Kabupaten Bulungan berupaya untuk memberikan hasil terbaik dari pemanfaatan segala sumberdaya yang dimiliki yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunannya untuk seluas-luasnya kesejahteraan Masyarakat, serta memiliki nilai lebih dari daerah lain baik dalam lingkup regional maupun nasional. Kemandirian ini merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya, serta perkembangan lingkungan perlu diadopsi secara kontinyu agar tidak terjadi kemunduran akibat stagnasi kualitas maupun kuantitas pembangunan terutama yang terjadi akibat rasa kepuasan dari keberhasilan sebelumnya.



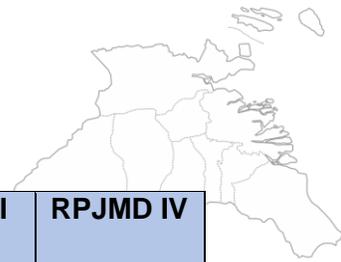
Berdaya Saing, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Bulungan didukung oleh SDM yang unggul dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana hal ini bermakna bahwa Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi wilayah yang unggul baik secara khusus di Provinsi Kalimantan Utara maupun secara umum untuk Pulau Kalimantan, karena sebagai ibukota Provinsi, Kabupaten Bulungan menjadi etalase bagi Provinsi Kalimantan Utara yang mencerminkan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara secara umum. Selain itu, konstelasi wilayah dimana Kabupaten Bulungan berpotensi menjadi wilayah penopang bagi ibukota baru Negara dan juga posisi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, perlu dilakukan pengembangan yang cukup signifikan agar Kabupaten Bulungan sebagai etalase Kalimantan Utara dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi internal wilayah tapi juga dalam menopang wilayah sekitarnya yang nantinya akan berdampak secara langsung pada pengembangan wilayah Kabupaten Bulungan itu sendiri dimana Kabupaten Bulungan dapat memiliki mitra baru dalam pengembangan pasar perekonomian Kabupaten Bulungan dalam konteks peningkatan basis ekonomi lokal Kabupaten Bulungan yang tentunya berorientasi pada pasar secara regional maupun global.

4.2. Sasaran Visi

Visi merupakan gambaran ideal tentang kondisi daerah yang ingin dicapai di akhir periode perencanaan, Visi ini menjadi pedoman dan arah bagi seluruh pembangunan di daerah tersebut. **Sasaran visi** kemudian menjadi pedoman dalam merumuskan misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah, dengan adanya sasaran visi RPJPD yang jelas dan terukur, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Berikut sasaran visi dan indikator kinerja dan target pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD dan Target Tahapan RPJMD

No.	Sasaran Visi / Indikator Kinerja	Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
1.	Peningkatan perekonomian wilayah yang diwujudkan dalam peningkatan tingkat pendapatan masyarakat					
	PDRB per kapita (Rp Juta)	165.00	168,75	172,50	176,31	180.00
2.	Peningkatan perekonomian wilayah melalui peningkatan sektor agroindustri dan industri unggulan					
	Rasio PDB Industri Pengolahan	14.00	17,73	19,86	21,47	23.71



No.	Sasaran Visi / Indikator Kinerja	Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
3.	Pemerataan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat					
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,99	8,5	8,2	8,0	7,80
	Rasio Gini (indeks)	0,300	0,286	0,269	0,247	0,230
4.	Pemerataan pembangunan untuk peningkatan ekonomi wilayah dan kontribusi bagi pembangunan secara regional					
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	18,95	20,00	22,00	24,00	26,00
	Indeks Daya Saing Daerah	3,23	3,55	3,87	4,19	4,5
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia					
	Indeks Pembangunan Manusia (2023)	73,20	74,52	75,84	77,16	78,50
6.	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission					
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	45,93	56,74	70,26	83,78	100

Sumber : Penyelarasan RPJPN 2025-2045, RPJPD Prov.Kaltara 2024-2025, Perumusan RPJPD Kab.Bulungan

4.3. Misi Daerah sebagai Perwujudan Visi dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045

Dalam perumusan misi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bulungan, selain mendasarkan pada visi yang telah dirumuskan, juga dikaitkan dengan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap program pembangunan jangka panjang pada tingkat Provinsi dan Nasional. Berdasarkan visi yang diusulkan diatas, maka usulan Misi dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang tangguh dan pusat pengembangan wilayah di Kalimantan yang unggul

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi terdepan bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, program peningkatan infrastruktur, pengembangan daya dukung untuk peningkatan perekonomian, dan pendukung lainnya perlu ditingkatkan hingga berkualitas unggul dalam proses pembangunan 20 tahun kedepan.

Selain itu Kabupaten Bulungan tentunya harus Tangguh dalam ekonomi, mewujudkan ekonomi yang tangguh dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

hanya menguntungkan Sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang rentan yang ada di Kabupaten Bulungan. Mewujudkan ekonomi yang hadal dan berkeadilan ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula bertumpu pada sektor industri menjadi ekonomi berbasis investasi dan pengembangan UMKM.

Dengan konstelasi wilayah dimana Kabupaten Bulungan memiliki jarak yang masih dalam lingkup regional dengan IKN dan juga sebagai ibukota Provinsi dimana Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentunya Kabupaten Bulungan perlu mengambil peran penting untuk mendukung dan memanfaatkan posisi strategis tersebut dengan mengembangkan program pengembangan wilayah dan pengembangan perekonomian yang terarah.

2) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang unggul dan berdaya saing

Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur yang maju; memperkuat perekonomian lokal berbasis keunggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan

3) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdemokratis dan berlandaskan hukum

Memantapkan kelembagaan demokrasi; memperkuat peran masyarakat; memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah; meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil konsekuen, memihak masyarakat dan tidak diskriminatif

4) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Menyelenggarakan pembangunan yang bukan hanya berorientasi pada rencana pembangunan pada jangka tertentu namun pembangunan yang dapat bermanfaat sepanjang masa dengan mengoptimalkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang terbarukan serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

5) Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan yang merata, handal, dan berwawasan lingkungan

Infrastruktur merupakan komponen penting dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah, penyediaan infrastruktur haruslah merata untuk seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan, dan dengan adanya pertumbuhan penduduk serta perkembangan kebutuhan wilayah tentunya Pembangunan infrastruktur harus berorientasi jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



sehingga dapat tetap tersedia dan menyediakan bagi kebutuhan pengembangan daerah hingga waktu yang tidak terbatas

6) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, dan berkeadilan sosial serta memiliki wawasan dan kepedulian akan keberlanjutan lingkungan hidup

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi tentunya menjadi wilayah yang memiliki banyak keberagaman mulai dari suku, ras, agama, dan golongan, keberagaman ini tentunya haruslah menjadi potensi dalam pengembangan wilayah bukan menjadi halangan dalam Pembangunan namun tetap mengedepankan kelestarian budaya dan kearifan lokal, serta dalam perkembangannya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup

7) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Dinamis, inovatif, dan akuntabel bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat dipercaya oleh masyarakat, warga negara, dan pemangku kepentingan lainnya, menjalankan kebijakannya dengan transparan, akuntabel, jujur, berintegritas serta responsif dalam menangani seluruh keluhan masyarakat serta mengembangkan pelayanan publik berbasis inovasi dan modern secara elektronik.

Tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis inovasi diharapkan pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki kemampuan untuk merespon perubahan – perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi dan teknologi sehingga dengan dinamika atau perubahan – perubahan pada era globalisasi yang semakin cepat menuntut pemerintah dapat merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena pelayanan publik yang berkualitas berbasis inovasi sangat penting dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern saat ini.

Pemerintahan yang dapat dipercaya dan mampu beradaptasi dengan cepat menjadi modal utama dalam hal membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan – tujuan pembangunan jangka panjangnya dalam hal ini melibatkan pembangunan kebijakan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bulungan.



8) Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang inklusif dan berkesinambungan

Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bulungan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu ekosistem Pembangunan yang menggabungkan secara holistik aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan alam. Ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana serta mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang aman, tangguh dan memenuhi kaidah berkelanjutan.

Tabel 4.2 Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, dan RPJPD Kab.Bulungan

No	RPJPN 2025/2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kabupaten
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif berkeadilan	Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang unggul dan berdaya saing
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang tangguh dan pusat pengembangan wilayah di Kalimantan yang unggul
3		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata Kelola yang kolaboratif dan inovatif	Misi 7 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI	Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdemokratis dan berlandaskan hukum
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 6 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, dan berkeadilan sosial serta memiliki wawasan dan kepedulian akan keberlanjutan lingkungan hidup



No	RPJPN 2025/2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kabupaten
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda Misi	Misi	Misi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Misi 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
7		Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 5 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan yang merata, handal, dan berwawasan lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia emas	Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang inklusif dan berkesinambungan

Sumber : RPJPN 2025-2045, RPJPD Prov.Kaltara 2024-2025, Perumusan RPJPD Kab.Bulungan



V | ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan RPJPD menyajikan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok RPJPD.

Tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 terbagi menjadi 4 (empat) periode, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045). Setiap periode 5 (lima) tahunan tersebut memiliki arah kebijakan yang diharapkan dapat memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi RPJPD “Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Yang Maju Dan Berkelanjutan Di Kalimantan Dengan SDM Yang Mandiri, Dan Berdaya Saing”. Arah kebijakan masing-masing periode pembangunan dimuat pada gambar di bawah.

5.2.1. Arah Kebijakan Periode Pertama (2025 – 2029)

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dijadikan sebagai Pijakan Dasar dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama, terutama digunakan untuk menata pijakan dasar pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Peletakan dasar masa pembangunan jangka panjang pada tahap pertama terutama peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang tangguh sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan berpihak pada masyarakat, dukungan infrastruktur dasar lebih diarahkan kepada pengembangan wilayah tertinggal, pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa berjalan lebih efisien dan efektif, dan penegakan aturan lebih diutamakan serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan. Tema pembangunan pada RPJM tahap



pertama ini adalah **Penopang Akselerasi Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Publik serta Penataan Seluruh Sektor dengan Menekankan Peningkatan Pelayanan Dasar.** Fokus arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam RPJM awal atau tahap Pertama ini antara lain adalah:

- a. Pembangunan berkelanjutan pada semua sektor dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang dan meningkatkan infrastruktur hijau di Kabupaten Bulungan
- b. Peningkatan kualitas perekonomian wilayah melalui peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kualitas produk hasil pertanian
- c. Peningkatan Pelayanan Pendidikan melalui pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan pra-sekolah sampai Pendidikan wajib 9 tahun hingga tingkat desa kelurahan
- d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- e. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur di tingkat Pusat Pertumbuhan
- f. Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
- g. Pembangunan ketakwaan dan kerukunan masyarakat

5.2.2. Arah Kebijakan Periode Kedua (2030 - 2034)

Program Jangka Menengah pada tahap kedua di arah pada Pemantapan peningkatan kualitas SDM, pengembangan perekonomian ekonomi basis sebagai pijakan ekonomi lokal, dan semuanya dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi pembangunan pada saat ini secara keseluruhan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bulungan, lingkungan mulai terkendali dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang semakin meningkat dari seluruh komponen lapisan masyarakat.

Penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah, kondisi lingkungan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bulungan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan atas dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan dan adanya peningkatan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dengan menerapkan sanksi dan peraturan perundangan yang berlaku.



Secara keseluruhan dalam Program Jangka Menengah Kedua diarahkan pada Pengembangan **Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan pelayanan dasar dan pengembangan potensi wilayah Bulungan.** Fokus arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam RPJM tahap Kedua ini antara lain adalah :

- a. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan angka partisipasi Pendidikan tinggi
- b. Peningkatan dan promosi upaya Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- c. Pemantapan dan peningkatan infrastruktur hingga tingkat desa/kelurahan
- d. Pemantapan Agroidustri dan Optimalisasi KIH/KIPI

5.2.3. Arah Kebijakan Periode Ketiga (2036 – 2040)

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama 2 (dua) periode sebelumnya diharapkan dapat menunjukkan pemantapan pemerataan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat dan berkelanjutan. Pada tahap Periode ketiga konsentrasi pembangunan lebih mengarah pada Kualitas daerah yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional hingga internasional. Pembangunan prasarana dan sarana dasar diharapkan telah mencapai ke seluruh wilayah pedesaan sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan semakin efektif, efisien dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah yang diikuti dengan peningkatan kualitas lingkungan secara global semakin mantap.

Pembangunan pada tahapan RPJM ketiga ini memiliki tema **Optimalisasi Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan pembangunan daerah untuk meningkatkan peran Bulungan pada level Regional, dan Internasional.** Fokus arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam RPJM tahap Ketiga ini antara lain adalah :

- a. Peningkatan kualitas perekonomian wilayah melalui hilirisasi pertanian, dan hilirisasi produk pertambangan
- b. Pemantapan wajib belajar 12 tahun dan pemenuhan angka partisipasi Pendidikan Tinggi hingga 90%
- c. Peningkatan inovasi daerah melalui pengembangan kerjasama dengan Perguruan tinggi sebagai inkubator Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan pengembangan pusat kegiatan regional dan keterhubungan dengan wilayah lain hingga level internasional



5.2.4. Arah Kebijakan Periode Keempat (2040 – 2045)

Setelah capaian pembangunan pada seluruh bidang yang dapat dilakukan dengan konsisten selama 3 (tiga) periode sebelumnya diharapkan menunjukkan pemantapan pemerataan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Pada tahap Periode keempat konsentrasi pembangunan lebih mengarah pada **Kabupaten Bulungan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional, Maju, dan Berkelanjutan, dan menjadikan Bulungan sebagai salah satu sentra pertumbuhan Kalimantan dengan sumberdaya yang unggul melalui pembangunan yang berkelanjutan**. Pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat secara optimal, peningkatan efisiensi dan efektifitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan pembangunan berkelanjutan bersesuaian dengan tata ruang wilayah berbasis ekologi. Ketergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbaharukan semakin berkurang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang serta struktur ekonomi semakin mantap. Dalam RPJM keempat ini kemandirian dan daya daerah yang tinggi dicirikan dengan mantapnya sistem pembangunan, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata daerah lain hingga rata-rata provinsi dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup nasional hingga global.

Secara umum kualitas sumberdaya manusia sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang baik; Perekonomian tumbuh diatas rata-rata daerah lain atau rata-rata Provinsi dengan tingkat ketimpangan dan kesenjangan yang rendah; Prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah pedesaan; Pemerintahan sudah berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas yang tinggi serta diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; Penataan ruang menjadi acuan pembangunan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaga keanekaragamannya.

Fokus arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam RPJM terakhir atau tahap keempat ini antara lain :

- a. Pemantapan wajib belajar 12 tahun dan pemenuhan angka partisipasi Pendidikan Tinggi hingga 90%
- b. Peningkatan inovasi daerah melalui pengembangan kerjasama dengan Perguruan tinggi sebagai inkubator Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan pengembangan pusat kegiatan regional dan keterhubungan dengan wilayah lain hingga level internasional

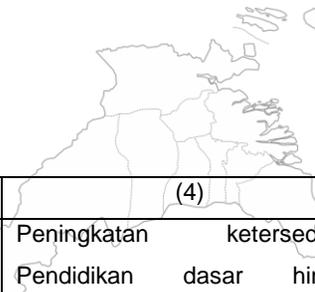


Tabel 5.1 Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045

MISI	Tema Pembangunan			
	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
	<p>Penopang Akselerasi Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Publik serta Penataan Seluruh Sektor dengan Menekankan Peningkatan Pelayanan Dasar</p>	<p>Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan pelayanan dasar dan pengembangan potensi wilayah Bulungan</p>	<p>Optimalisasi Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan pembangunan daerah untuk meningkatkan peran Bulungan pada level Regional, dan Internasional</p>	<p>Kabupaten Bulungan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional, Maju, dan Berkelanjutan, dan menjadikan Bulungan sebagai salah satu sentra pertumbuhan Kalimantan dengan sumberdaya yang unggul melalui pembangunan yang berkelanjutan</p>
Arah Kebijakan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang tangguh dan pusat pengembangan wilayah di Kalimantan yang unggul</p>	<p>Pengembangan industri dan agroindustri dengan mengembangkan pengembangan keterhubungan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di Bulungan</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata serta Pembangunan pusat pemasaran dan perdagangan skala internasional di Kabupaten Bulungan</p>	<p>Peningkatan peran KIH/KIPI Tanah Kuning Sebagai pusat Industri Nasional yang berorientasi pasar Dunia dalam rangka pengembangan industri dan agroindustri</p>	<p>Peningkatan kualitas hasil pertanian dan kualitas pengemasan hasil pertanian agar dapat bersaing hingga pasar internasional dan perluasan pasar hasil pertanian Bulungan hingga mencapai pasar internasional</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang unggul dan berdaya saing	Penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kesejahteraan pekerja, derajat Kesehatan penduduk, dan pendapatan penduduk	Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan Pembangunan Kabupaten Bulungan	Peningkatan ketersediaan Pendidikan dasar hingga menengah pertama untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bulungan serta Peningkatan bantuan beasiswa Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi Pendidikan hingga Tingkat Pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana Kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan dan meningkatkan dan pemerataan jumlah jaringan kualitas, fasilitas kesehatan dasar;
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdemokratis dan berlandaskan hukum	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur sebagai payung budaya dalam proses Pembangunan serta dilakukan peningkatan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah	Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur sebagai payung budaya dalam proses pembangunan	Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah
Misi 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Memaksimalkan kesesuaian data keluarga miskin melalui inventarisasi potensi desa serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu	Menetapkan seluruh kegiatan pembangunan wilayah menjadi berorientasi pada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan serta pelestarian Kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan Utara	Memperkuat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi unggulan hingga tingkat desa/kelurahan serta menjaga ketahanan dan swasembada pangan daerah	Memantapkan ketersediaan pangan dengan ketahanan dan swasembada pangan daerah dan pasokan bahan bakar minyak sehingga tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu aktifitas



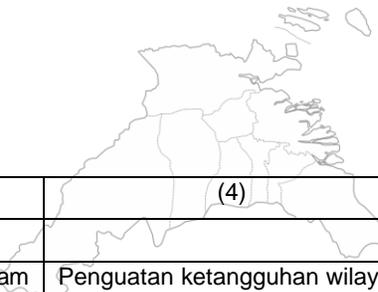
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai <i>HoB</i>		masyarakat dan kegiatan perekonomian
Misi 5 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan yang merata, handal, dan berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan memastikan konektivitas jaringan dan ketersediaan infrastruktur hingga wilayah perdesaan	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan memastikan konektivitas jaringan dan ketersediaan infrastruktur hingga wilayah perdesaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk membantu terjaminnya kualitas infrastruktur	Pemantapan ketersediaan infrastruktur yang handal dan merata serta dilakukan percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat Pengembangan layanan digital administrasi kependudukan yang merata hingga tingkat desa	Pemantapan infrastruktur yang handal dan merata serta pengembangan Kawasan strategis industri hijau
Misi 6 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, dan berkeadilan sosial serta memiliki wawasan dan kepedulian akan keberlanjutan lingkungan hidup	Pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan input materi terkait dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan dan diimbangi dengan peningkatan implementasi dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Perluasan pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pemahaman terhadap budaya lokal untuk penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam peningkatan pemahaman dan promosi kebudayaan daerah serta pengembangan budaya sebagai potensi wisata unggulan lokal	Peningkatan pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam pembangunan
Misi 7 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel	Pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan input materi terkait dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat dan peningkatan implementasi dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata Kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek Pemerintahan digital



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang inklusif dan berkesinambungan	Penyelenggaraan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim pada wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir berbasis sistem informasi geospasial melalui penguatan regulasi rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan)	Pengembangan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta, badan usaha, dan Masyarakat, serta dari aspek tata ruang dilakukan pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi	Penguatan ketangguhan wilayah pesisir dan mendukung percepatan dan pemantapan pelaksanaan reforma agraria	Pengembangan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah serta implementasi Perencanaan dan Penyiapan infrastruktur yang berkesinambungan



5.2 Sasaran Pokok

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

5.2.1.1 Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian dan Pengembangan wilayah di Kalimantan yang Unggul

Untuk mewujudkan misi pertama dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, maka dirumuskan sasaran pokok dan arah pembangunan sebagai berikut :

- A. Sasaran Pokok 1, Terwujudnya daerah Agrobisnis, Agroindustri, dan Industri Unggulan Daerah sebagai Basis Perekonomian wilayah sebagai langkah dalam hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan untuk mempercepat transformasi ekonomi wilayah sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas, dengan arah pembangunan peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan tersebut dan mendukung pencapaian tujuan nasional dirumuskan arah kebijakan transformasi sebagai berikut:
- 1) Peningkatan luasan lahan pangan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mencukupi 1,5 kali kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bulungan
 - 2) Perluasan pasar hasil pertanian Bulungan hingga mencapai pasar internasional
 - 3) Peningkatan kualitas hasil pertanian dan kualitas pengemasan hasil pertanian agar dapat bersaing hingga pasar internasional
 - 4) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian
 - 5) Pengembangan keterhubungan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland
 - 6) Peningkatan peran KIH/KIPI Tanah Kuning Sebagai pusat Industri Nasional yang berorientasi pasar Dunia
 - 7) Peningkatan Peran Kabupaten Bulungan sebagai wilayah pendukung dan simpul inlet/outlet pendukung bagi kebutuhan pengembangan IKN
- B. Sasaran Pokok 2 : Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi yang handal sehingga mampu mengintegrasikan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, sentra produksi, dan pasar di wilayah Kalimantan dan konstelasinya terhadap keterhubungan dengan negara tetangga, dengan rumusan arah kebijakan antara lain :
- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan di Bulungan
 - 2) Peningkatan keterhubungan jaringan transportasi perkotaan, jaringan transportasi regional antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, jaringan transportasi regional antar pusat kegiatan di Kalimantan dengan Bulungan



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- 3) Transformasi Digital dalam pelayanan bagi masyarakat dan dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Peningkatan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel di seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan
- 5) Pengembangan dan peningkatan simpul transportasi pada simpul Pelabuhan dan Bandar Udara agar terhubung langsung hingga tingkat internasional
- 6) Menjamin keterhubungan jaringan transportasi darat hingga wilayah IKN

C. Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian Bulungan melalui peningkatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, dengan rumusan arah kebijakan antara lain :

- 1) Pembangunan pusat pemasaran dan perdagangan skala internasional di Kabupaten Bulungan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata
- 3) Peningkatan promosi pariwisata Bulungan hingga pasar internasional

D. Sasaran Pokok 4 : Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan yang handal, jaminan hukum, keamanan, dan insentif yang menarik serta promosi daerah, dengan rumusan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dengan lingkungan yang kondusif
- 2) Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha mainland dan hinterland, serta usaha sektor basis dan sektor non-basis
- 3) Peningkatan pelayanan investasi melalui debirokratisasi dan digitalisasi layanan namun tetap berpegang pada wawasan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

5.2.1.2 Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bulungan yang Unggul dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan misi ketiga RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

A. Sasaran Pokok 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- 1) Penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan kesejahteraan pekerja
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
 - 3) Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk
 - 4) Peningkatan pendapatan penduduk
 - 5) Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran
- B. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna melalui peningkatan fasilitas penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi berkelanjutan serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :
- 1) Penguatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis
 - 2) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 3) Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan Pembangunan Kabupaten Bulungan
- C. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, hingga Pendidikan tinggi di Kabupaten Bulungan melalui sinergitas antar hirarki kelembagaan pengelola Pendidikan, dengan rumusan arah kebijakan antara lain sebagai berikut :
- 1) Peningkatan ketersediaan Pendidikan dasar hingga menengah pertama untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bulungan
 - 2) Peningkatan kerjasama Pendidikan, penelitian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bulungan
 - 3) Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Bulungan
 - 4) Peningkatan bantuan beasiswa Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi Pendidikan hingga Tingkat Pendidikan tinggi
- D. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat yang dicirikan dengan menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak, dengan rumusan arah kebijakan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- 1) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial
- 2) Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat
- 3) Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- 5) Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 6) Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecatatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.

E. Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan Kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana Kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan
- 2) Meningkatkan dan pemerataan jumlah jaringan kualitas, fasilitas kesehatan dasar;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
- 4) Penjaminan ketersediaan, pengawasan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;
- 5) Peningkatan kerjasama antar daerah dan dengan sektor swasta dalam peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

5.2.1.3 Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdemokratis dan berlandaskan hukum

Untuk mewujudkan capaian misi kelima RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

A. Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban beragama sehingga terbentuk karakter masyarakat yang Tangguh, kompetitif, beradab, dan bermoral tinggi sebagai watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, dan budaya



- 2) Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur sebagai payung budaya dalam proses pembangunan

B. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran hukum dan terciptanya ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat yang dinamis, aman, tertib, dan harmonis, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah
- 3) Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan Masyarakat
- 4) Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah

5.2.1.4 Misi 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Untuk mewujudkan misi kelima dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

A. Sasaran Pokok 1 : Tingkat pembangunan yang makin merata yang diwujudkan dengan semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan antarsub satuan wilayah pengembangan, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Memperkuat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi unggulan hingga tingkat desa/kelurahan
- 2) Menjamin ketersediaan layanan dasar hingga tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan

B. Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya pengentasan kemiskinan terpadu berbasis potensi wilayah melalui program pemberdayaan masyarakat dan kemudahan akses pelayanan dasar, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan kesesuaian data keluarga miskin melalui inventarisasi potensi desa



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu
- 3) Menjaga ketahanan dan swasembada pangan daerah
- 4) Menjamin ketersediaan kebutuhan sandang dan papan

C. Sasaran Pokok 3 : Terpenuhinya pasokan energi dan kelistrikan di seluruh wilayah sehingga mampu menjamin keberlangsungan dan meningkatkan aktifitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, dengan rumusan arah kebijakan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyediaan energi ramah lingkungan hingga tingkat desa/kelurahan
- 2) Memantapkan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak sehingga tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu aktifitas masyarakat dan kegiatan perekonomian

D. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan karakteristik serta berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung alam dalam pemanfaatannya untuk kehidupan masyarakat secara luas

- 1) Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya untuk Kawasan lindung
- 2) Menetapkan seluruh kegiatan pembangunan wilayah menjadi berorientasi pada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
- 3) Mengembangkan energi terbarukan dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
- 4) Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya yang berada pada kondisi kritis
- 5) Peningkatan persentase bangunan hijau dan ramah lingkungan serta didukung dengan peningkatan RTH
- 6) Pelestarian Kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai *HoB*



5.2.1.5 Misi 5 : Mewujudkan peyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan yang merata, handal, dan berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan misi keenam dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- A. Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya kehandalan konektifitas antar wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah hingga kawasan Perdesaan di Kabupaten Bulungan, dengan rumusan arah kebijakan antara lain sebagai berikut :
- 1) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan memastikan konektifitas jaringan hingga wilayah perdesaan
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum yang di Kawasan Perkotaan dan keterhubungan perkotaan dengan Kawasan perdesaan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk membantu terjaminnya kualitas infrastruktur
 - 4) Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan non perpipaan
 - 5) Peningkatan pelayanan serta penyediaan TPU
 - 6) Pemantapan infrastruktur yang handal dan pengembangan Kawasan strategis industri hijau
 - 7) Peningkatan cakupan layanan persampahan mulai dari hulu hingga hilir berbasis teknologi dan pemberdayaan Masyarakat
 - 8) Percepatan pembangunan Kawasan perbatasan dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Kabupaten Bulungan
 - 9) Pengembangan simpul bandar udara untuk pergerakan hingga internasional
 - 10) Pengembangan simpul Pelabuhan sebagai inlet/outlet ekspor/impur hingga tingkat internasional
 - 11) Menjamin keterhubungan jaringan transportasi darat hingga wilayah Kabupaten dan Provinsi Tetangga
 - 12) Pengembangan transportasi antar moda melalui perwujudan simpul dan jaringan yang terintegrasi
- B. Sasaran pokok 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan yang merata, profesional, dan akuntabel
- 1) Pengembangan layanan digital administrasi kependudukan yang merata hingga tingkat desa



- 2) Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata Kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
- 3) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat
- 4) Penguatan sistem kelembagaan yang berintegritas sebagai Upaya pencegahan korupsi
- 5) Penguatan tata Kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan bebas korupsi

5.2.1.6 Misi 6 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, dan berkeadilan sosial serta memiliki wawasan dan kepedulian akan keberlanjutan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan misi ketujuh dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- A. Sasaran Pokok 1 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, serta berkeadilan sosial, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Perluasan pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pemahaman terhadap budaya lokal
 - 2) Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam peningkatan pemahaman dan promosi kebudayaan daerah serta pengembangan budaya sebagai potensi wisata unggulan lokal
 - 3) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- B. Sasaran Pokok 2 : Mewujudkan peningkatan wawasan dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatannya yang berkelanjutan, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan input materi terkait dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan
 - 2) Peningkatan implementasi dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - 3) Peningkatan pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam pembangunan



5.2.1.7 Misi 7 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel

Untuk mewujudkan misi kedelapan dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- A. Sasaran Pokok 1 : Peningkatan tata Kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah
 - 2) Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor layanan Pemerintahan
 - 3) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
 - 4) Peningkatan kualitas pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
 - 5) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan
- B. Sasaran Pokok 2 : Peningkatan fungsi Pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata Kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
 - 2) Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek Pemerintahan digital
 - 3) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
- C. Sasaran Pokok 3 : Penguatan tata Kelola yang dinamis, inovatif, dan akuntabel, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Perwujudan tata Kelola dan layanan Pemerintahan berbasis digital
 - 2) Perwujudan tata Kelola Pemerintahan unggul dan bertaraf internasional
 - 3) Perwujudan Pemerintahan yang berintegritas

5.2.1.8 Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang Inklusif dan Berkesinambungan

Untuk mewujudkan misi kesembilan dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045 ini, dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



- A. Sasaran Pokok 1 : Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola Pemerintahan yang Berkesinambungan, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim pada wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir berbasis sistem informasi geospasial
 - 2) penguatan regulasi rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan)
 - 3) Pengembangan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
 - 4) Perencanaan dan Penyiapan infrastruktur yang berkesinambungan
- B. Sasaran Pokok 2 : Peningkatan Ketahanan sosial, dan ekonomi lingkungan, dengan rumusan arah kebijakan Pembangunan antara lain sebagai berikut :
- 1) Pengembangan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta, badan usaha, dan Masyarakat
 - 2) Pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi
 - 3) Peningkatan mitigasi structural dan non structural dalam menanggulangi perubahan iklim
 - 4) Mendukung percepatan dan pemantapan pelaksanaan reforma agrarian
 - 5) Penguatan ketangguhan wilayah pesisir

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Bulungan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi pembangunan. Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan, maka tahapan pembangunan dilakukan dalam tahapan 5 (lima) tahunan, sekaligus menjadi Rencana agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara keseluruhan tahapan dalam RPJP ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang terdiri dari RPJM Pertama dimulai dari tahun 2025 – 2030, RPJM Kedua dimulai dari tahun 2031 – 2035, RPJM Ketiga dimulai dari tahun 2036 – 2040 dan RPJM Keempat dimulai dari tahun 2041 – 2045.

Secara umum permasalahan yang sangat mendesak merupakan skala prioritas yang utama dalam pemecahan masalah dalam skala pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih strategis. Hal ini berkaitan dengan distribusi penduduk



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



dalam area yang sangat luas dan terkonsentrasi di pedesaan dan kecamatan yang secara keseluruhan memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan salah satu bagian yang terpenting adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya pergerakan ekonomi utama di Kabupaten Bulungan kondisi saat ini adalah dari hasil pengelolaan hasil hutan, serta pengelolaan migas dan pertambangan yang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan.

Dalam jangka panjang pengelolaan hasil hutan, migas dan pertambangan sangat mempengaruhi struktur ekonomi, sehingga diperlukan perubahan struktur dasar ekonomi yang lebih mengandalkan agribisnis dan industri pengolahan berbasis bahan terbarukan dengan didukung sumberdaya manusia yang handal, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Berbagai hal yang diperlukan untuk menjamin kondisi daerah yang selalu kondusif dan diminati oleh investor adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang keadaan tersebut tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan infrastruktur berupa transportasi darat, laut/sungai dan udara, serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan Daerah, Kecamatan dan Pedesaan serta sentra ekonomi. Permasalahan lain yang memerlukan penanganan segera adalah Wilayah tertinggal dan Kemiskinan, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dan penurunan kemiskinan dibandingkan dengan daerah lain, disamping itu penataan ruang yang dilaksanakan secara konsisten terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan yang disertai dengan penanganan masalah lingkungan hidup.

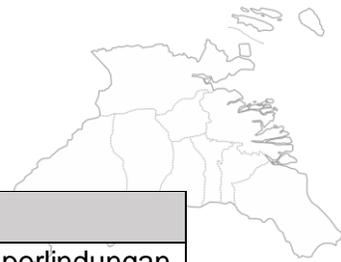
Terkait dengan kebutuhan akan peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong kemandirian wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih optimal, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat maka perlu pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dilakukannya pemekaran wilayah Kecamatan di kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan harus diimbangi dengan semangat peningkatan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 terperinci sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.2 Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045

No.	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	Peningkatan sumber daya manusia berbasis gender
		Pemanfaatan IPTEKIN dalam peningkatan nilai tambah ekonomi
		Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan akses layanan pendidikan
		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
		Peningkatan layanan kesehatan yang inklusif
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian
		Peningkatan Transformasi Ekonomi Digital
		Peningkatan keterhubungan jaringan transportasi Antar Daerah
		peningkatan nilai tambah ekonomi potensial sektor jasa, perdagangan dan pariwisata
		Peningkatan iklim investasi dan kemandirian fiskal
3	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan kualitas regulasi daerah dan tata kelola yang adaptif
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Perwujudan tata Kelola dan layanan Pemerintahan berbasis digital
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
		Peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi berbasis supremasi hukum
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan peran perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi



No.	Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan
		Pengentasan kemiskinan dan perlindungan masyarakat rentan melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu
		Peningkatan ketahanan energi dalam meningkatkan aktifitas ekonomi dan kehidupan masyarakat
		Penerapan ekonomi hijau melalui kemandirian pangan, ketahanan air, dan lingkungan hidup yang berkualitas
7	Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan aksesibilitas untuk mendukung sinergi pembangunan antar wilayah
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas pelayanan publik
8	Kesinambungan Pembangunan	Peningkatan ketahanan bencana
		Peningkatan ketahanan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi merupakan gambaran upaya transformasi penurunan dari RPJPN dan RPJPD Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/ karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 sebagai berikut

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan

No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan kesejahteraan pekerja2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)3. Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk4. Peningkatan pendapatan penduduk



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">5. Peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran6. Penguatan keterkaitan tenaga kerja dengan sektor bisnis7. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi8. Peningkatan daya jangkau, kuantitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan Pembangunan Kabupaten Bulungan9. Peningkatan ketersediaan Pendidikan dasar hingga menengah pertama ntuk memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bulungan10. Peningkatan kerjasama Pendidikan, penelitian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bulungan11. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Bulungan12. Peningkatan bantuan beasiswa Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi Pendidikan hingga Tingkat Pendidikan tinggi13. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penduduk rentan sosial14. Pembangunan dan peningkatan gizi masyarakat15. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;16. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;17. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular;



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">18. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecatatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular19. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana Kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan20. Meningkatkan dan pemerataan jumlah jaringan kualitas, fasilitas kesehatan dasar;21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;22. Penjaminan ketersediaan, pengawasan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;23. Peningkatan kerjasama antar daerah dan dengan sektor swasta dalam peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan luasan lahan pangan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mencukup 1,5 kali kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bulungan2. Perluasan pasar hasil pertanian Bulungan hingga mencapai pasar internasional3. Peningkatan kualitas hasil pertanian dan kualitas pengemasan hasil pertanian agar dapat bersaing hingga pasar internasional4. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian5. Pengembangan keterhubungan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland6. Peningkatan peran KIH/KIPI Tanah Kuning Sebagai pusat Industri Nasional yang berorientasi pasar Dunia7. Peningkatan Peran Kabupaten Bulungan sebagai wilayah pendukung dan simpul inlet/outlet pendukung bagi kebutuhan pengembangan IKN8. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan di Bulungan



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">9. Peningkatan keterhubungan jaringan transportasi perkotaan, jaringan transportasi regional antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, jaringan transportasi regional antar pusat kegiatan di Kalimantan dengan Bulungan10. Transformasi Digital dalam pelayanan bagi masyarakat dan dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah11. Peningkatan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel di seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan12. Pengembangan dan peningkatan simpul transportasi pada simpul Pelabuhan dan Bandar Udara agar terhubung langsung hingga tingkat internasional13. Menjamin keterhubungan jaringan transportasi darat hingga wilayah IKN14. Pembangunan pusat pemasaran dan perdagangan skala internasional di Kabupaten Bulungan15. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata16. Peningkatan promosi pariwisata Bulungan hingga pasar internasional17. Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dengan lingkungan yang kondusif18. Pengembangan kemitraan usaha-usaha antara usaha mainland dan hinterland, serta usaha sektor basis dan sektor non-basis19. Peningkatan pelayanan investasi melalui debirokratisasi dan digitalisasi layanan namun tetap berpegang pada wawasan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
3	Transformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none">1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah2. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor layanan Pemerintahan3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah4. Peningkatan kualitas pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko5. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan6. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata Kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi7. Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek Pemerintahan digital8. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat9. Perwujudan tata Kelola dan layanan Pemerintahan berbasis digital10. Perwujudan tata Kelola Pemerintahan unggul dan bertaraf internasional11. Perwujudan Pemerintahan yang berintegritas
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi kehidupan beragama, sosial, dan budaya2. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur sebagai payung budaya dalam proses pembangunan3. Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah5. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan Masyarakat6. Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none">1. Perluasan pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pemahaman terhadap budaya lokal2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam peningkatan pemahaman dan promosi kebudayaan daerah serta pengembangan budaya sebagai potensi wisata unggulan lokal3. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat4. Pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan input materi terkait dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan5. Peningkatan implementasi dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan yang berwawasan lingkungan6. Peningkatan pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam pembangunan
6	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi unggulan hingga tingkat desa/kelurahan2. Menjamin ketersediaan layanan dasar hingga tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">3. Memaksimalkan kesesuaian data keluarga miskin melalui inventarisasi potensi desa4. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu5. Menjaga ketahanan dan swasembada pangan daerah6. Menjamin ketersediaan kebutuhan sandang dan papan7. Penyediaan energi ramah lingkungan hingga tingkat desa/kelurahan8. Memantapkan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak sehingga tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu aktifitas masyarakat dan kegiatan perekonomian9. Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya untuk Kawasan lindung10. Menetapkan seluruh kegiatan pembangunan wilayah menjadi berorientasi pada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan11. Mengembangkan energi terbarukan dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan12. Meningkatkan upaya rehabilitas dan pemulihan terhadap sumber daya yang berada pada kondisi kritis13. Peningkatan persentase bangunan hijau dan ramah lingkungan serta didukung dengan peningkatan RTH14. Pelestarian Kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai <i>HoB</i>
7	Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan memastikan konektifitas jaringan hingga wilayah perdesaan



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum yang di Kawasan Perkotaan dan keterhubungan perkotaan dengan Kawasan perdesaan3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk membantu terjaminnya kualitas infrastruktur4. Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan non perpipaan5. Peningkatan pelayanan serta penyediaan TPU6. Pemantapan infrastruktur yang handap dan pengembangan Kawasan strategis industri hijau7. Peningkatan cakupan layanan persampahan mulai dari hulu hingga hilir berbasis teknologi dan pemberdayaan Masyarakat8. Percepatan pembangunan Kawasan perbatasan dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Kabupaten Bulungan9. Pengembangan simpul bandar udara untuk pergerakan hingga internasional10. Pengembangan simpul Pelabuhan sebagai inlet/outlet ekspor/impor hingga tingkat internasional11. Menjamin keterhubungan jaringan transportasi darat hingga wilayah Kabupaten dan Provinsi Tetangga12. Pengembangan transportasi antar moda melalui perwujudan simpul dan jaringan yang terintegrasi13. Pengembangan layanan digital administrasi kependudukan yang merata hingga tingkat desa14. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata Kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi



No.	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045
		<p>15. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat</p> <p>16. Penguatan sistem kelembagaan yang berintegritas sebagai Upaya pencegahan korupsi</p> <p>17. Penguatan tata Kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan bebas korupsi</p>
8	Kesinambungan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim pada wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir berbasis sistem informasi geospasial2. penguatan regulasi rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan)3. Pengembangan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Perencanaan dan Penyiapan infrastruktur yang berkesinambungan4. Pengembangan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta, badan usaha, dan Masyarakat5. Pengembangan dan pematapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi6. Peningkatan mitigasi structural dan non structural dalam menanggulangi perubahan iklim7. Mendukung percepatan dan pematapan pelaksanaan reforma agrarian8. Penguatan ketangguhan wilayah pesisir



5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil perumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan 2025-2045 yang kemudian diturunkan kedalam 5 misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan, dimana di setiap misi yang dirumuskan diturunkan kembali kedalam sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang menjadi amanat bagi pembangunan jangka menengah untuk tiap periode, maka untuk memastikan capaian dari setiap sasaran pokok berdasarkan rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan 2025-2045 maka dirumuskan pula capaian sasaran pokok sebagaimana pada tabel 5.4 berikut:



Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bulungan

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target RPJPD			
					Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)
1. MISI 1: Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian dan Pengembangan wilayah di Kalimantan yang Unggul								
1.1	Terwujudnya daerah Agrobisnis, Agroindustri, dan Industri Unggulan Daerah sebagai Basis Perekonomian wilayah	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,42 (2023)	17,73	19,86	21,47	23,71
			PDRB Sektor Pertanian	Rp 3.267 M 4.140,52	Rp 3.400 M 4.975,04	Rp 3.600 M 6.018,19	Rp 3.800 M 7.061,34	Rp 4.000 M 8.313,12
1.2	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi yang handal	Peningkatan Transformasi Ekonomi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,19	1,59	2,09	2,59	3,19
			Indeks Masyarakat Teknologi Indonesia (IMDI)	44	47,00	50	53	56
		Peningkatan keterhubungan jaringan transportasi Antar Daerah	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
1.3	Terwujudnya peningkatan perekonomian Bulungan melalui peningkatan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata	peningkatan nilai tambah ekonomi potensial sektor jasa, perdagangan dan pariwisata	Pengembangan Pariwisata					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,41	1,85	2,01	2,36	2,72
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Jumlah Wisatawan per Kebangsaan (orang))	96.190	151.789	206.233	262.700	316.115
			Rasio PDRB Sektor Jasa/Pariwisata (%)	1,39	2,5	5	7,5	9
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif* (%)					
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN					
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	5,2	7	9,3	12,2	15,5
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	7	10	12	13	15
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,20	6,00	7,80	9,60	11,80
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,18	0,28	0,38	0,48	0,58
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,4	1,5	1,8	2,3	2,8
Rasio PDB Sektor Perdagangan (%)	8,24	10	12	14	16			
1.4	Terciptanya iklim investasi dan usaha	Peningkatan iklim investasi dan kemandirian fiskal	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	19	21	23	25	26
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			Biaya Logistik (% PDB)	21,02	18,00	16,00	14,00	12,00
			Rasio PDRB Sektor Jasa (%)	6,42	8	10	12	14
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0030	0,0035	0,0040	0,0045	0,0050
			Tingkat Inflasi (%)	2,71	2,65	2,5	2,55	2,5
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			c) Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			d) Total Kredit/PDRB (%)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			Inklusi Keuangan (%)	97,3	97,67	98,12	98,58	99,13



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target RPJPD			
					Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)
2. Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bulungan yang Unggul dan Berdaya Saing								
2.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan sumber daya manusia berbasis gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,3	57,5	57,75	58	58,25
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,34 (2023)	74,15	74,97	75,78	76,60
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,453	0,4	0,3	0,2	0,15
2.2	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna	Pemanfaatan IPTEKIN dalam peningkatan nilai tambah ekonomi	Tingkat Penguasaan IPTEK					
			a) Indeks Inovasi Daerah*	Target akan ditentukan kemudian				
			b) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	1,12	1,4	1,7	2	2,3
2.3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, hingga Pendidikan tinggi di Kabupaten Bulungan	Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan akses layanan pendidikan	Hasil Pembelajaran:					
			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Literasi Membaca	27,43 - 29,43	37,34	49,73	62,12	76,99 - 78,99
			ii) Numerasi	Target akan ditentukan kemudian				
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Literasi Membaca	69,5	71,6	73,5	75,8	77,8
			ii) Numerasi	50,6	54,8	59,1	63,3	65,7
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,34	9,62	10,89	11,56	12,23
			d) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,7	14	14,5	15	15,5
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	11,92	12,07	12,26	12,45	12,67
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	59,89	62,91	66,69	70,47	75			
2.4	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	Usia Harapan Hidup	72,78	73	73,5	74	74,5
			Kesehatan ibu dan anak:					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	106 (2023)	83	61	38	16
			b) Prevalensi Stunting (Persen)	8,63	8	7	6	4
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	64,79	73,79	81,79	89,79	100
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85	88,5	92	95,5	100
2.5	Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan Kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemiteraan dalam bidang kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	81,5	85	87	90	92



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target RPJPD			
					Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)
3. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdemokratis dan berlandaskan hukum								
3.1	Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban beragama	Implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	82,3	84	86	88	90
3.2	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum	Peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi berbasis supremasi hukum	Indeks Pembangunan Hukum	-	0,8	0,82	0,84	0,86
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	<i>Target akan ditentukan kemudian</i>				
			Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
4. Misi 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan								
4.1	Tingkat pembangunan yang makin merata	Peningkatan peran perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan					
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah terhadap Provinsi	18,96	20	22	24	26
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,18	71,35	80,3	89,25	100
			c) Persentase Desa Mandiri (%)	12,2	30	50	70	90,0
4.2	Terwujudnya pengentasan kemiskinan terpadu berbasis potensi wilayah	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan masyarakat rentan melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu	Tingkat Kemiskinan (%)	8,99	8,5	8,2	8	7,80
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	65,00	68,00	72,00	76,00	79,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,015	0,02	0,03	0,04	0,05
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,21	3,96	3,73	3,52	3,24
4.3	Terpenuhinya pasokan energi dan kelistrikan di seluruh wilayah	Peningkatan ketahanan energi dalam meningkatkan aktifitas ekonomi dan kehidupan masyarakat	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			- Indeks Ketahanan Energi	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75
			- Rasio Elektrifikasi	93,2	94	95	96	97
4.4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam	Penerapan ekonomi hijau melalui kemandirian pangan, ketahanan air, dan lingkungan hidup yang berkualitas	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,63	8	7	6	4
			a) Indeks Ekonomi Hijau (Poin Indeks)	71,5	75	80	85	90,0
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	27,12	36,1	47,32	58,54	72
			c) Ketahanan Air					
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,267	0,412	0,557	0,701	0,990
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	65,74	72,59	81,16	89,72	100
5. Misi 5 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan yang merata, handal, dan berwawasan lingkungan								
5.1	Meningkatnya kehandalan konektivitas antar wilayah	Peningkatan aksesibilitas untuk mendukung sinergi pembangunan antar wilayah	23. Persentase jalan desa yang terhubung ke pusat kecamatan	92,7	93	94	95	97,0
			23. Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	72,5	75	77	79	82,0
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan yang merata, profesional, dan akuntabel.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas pelayanan publik	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	77,25	77,25	77,5	77,75	80



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target RPJPD					
					Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)		
6.	Misi 6 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, dan berkeadilan sosial serta memiliki wawasan dan kepedulian akan keberlanjutan lingkungan hidup									
6.1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang beradab, berbudaya, serta berkeadilan sosial	Penguatan nilai luhur kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,8 - 55,84	58,12	61,03	63,93	67,42-68,49		
6.2	Mewujudkan peningkatan wawasan dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatannya yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,434	0,466	0,507	0,547	0,596		
			Kualitas Lingkungan Hidup							
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin Indeks)	78,13	79	80	82	84,00		
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,04	25,88	46,16	62	70		
			c) Pengelolaan Sampah							
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	31,61	46,21	60,82	75,43	90,00		
- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)				<i>Target akan ditentukan kemudian</i>						
7.	Misi 7 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel									
7.1	Peningkatan tata Kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas	Peningkatan kualitas regulasi daerah dan tata kelola yang adaptif	Indeks Reformasi Hukum	58,64	64,96	71,28	77,60	84,05		
7.2	Peningkatan fungsi Pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif,	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,34 (Baik)	3,7 (Baik)	4 (Baik)	4,2 (Sangat Baik)	4,55 (Pelayanan Prima)		
7.3	Penguatan tata Kelola yang dinamis, inovatif, dan akuntabel	Perwujudan tata Kelola dan layanan Pemerintahan berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3		
8.	Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang Inklusif dan Berkesinambungan									
8.1	Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola Pemerintahan yang Berkesinambungan	Peningkatan ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	172,57 (2023)	155,74	143,91	132,08	120,25		
8.2	Peningkatan Ketahanan sosial, dan ekonomi lingkungan	Peningkatan ketahanan perubahan iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							
			a) Kumulatif	34,65	41,63	50,36	59,09	69,57		
			b) Tahunan	45,93	56,74	70,26	83,78	100		



VI | PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD Kabupaten Bulungan merupakan sub sistem RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2025-2045.

RPJPD ini ditetapkan untuk menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pada saat mencalonkan diri menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dimana visi, misi dan program prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan yang berdimensi waktu lima tahunan dan RPJPD ini menjadi acuan juga dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan yang berdimensi tahunan.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RPPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Bulungan akan mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bulungan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyusun RPJMD Teknokratik.

Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 2044 diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046 Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Kabupaten Bulungan berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.



Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan perlu didukung oleh komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokrasi, serta konsistensi kebijakan Pemerintah. Pembangunan jangka panjang daerah juga perlu mewujudkan keberpihakan pembangunan kepada rakyat dan juga peran serta aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJPD ditetapkan fungsi-fungsi pada Pemerintahan dalam pelaksanaan RPJPD. Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bulungan sebagai perwujudan fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Bulungan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 – 2045;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penjabaran RPJPD Kabupaten Bulungan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bulungan untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan dan pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD antar periode;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Daerah Kabupaten Bulungan berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Kabupaten Bulungan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan antara pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana spasial;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Untuk mewujudkan semua tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah, proses evaluasi terhadap kondisi terkini serta tren pembangunan perlu dilakukan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya dilakukan melalui manajemen risiko pembangunan daerah yang dilakukan secara komprehensif serta sinkronisasinya dengan kondisi pembangunan secara regional maupun nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

